

# **SKRIPSI**



## **TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DALAM ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG MENJADI HUTAN PRODUKSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD IRFAN F**

**B111 10 041**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2014**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTAS KEWENANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SINJAI DALAM ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG**

**OLEH  
MUH. IRFAN F  
B111 10 041**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi  
sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Tata Negara  
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2014**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : MUHAMMAD IRFAN F

No. Pokok : B 111 10 041

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Proposal : **Tinjauan Yuridis Impelementasi Kewenangan**

**Pemerintah Kabupaten Sinjai Dalam Alih Fungsi**

**Hutan Lindung**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 25 Desember 2013

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H.,M.H.**

NIP. 19570801 198503 1 005

**M. Zulfan Hakim, S.H.,M.H.**

NIP. 19751023 200801 1 010

## **ABSTRAK**

**MUH. IRFAN F, (B 111 10 041),** “Tinjauan Yuridis Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai Dalam Alih Fungsi Hutan Lindung”, dibimbing oleh Bapak M. Yunus Wahid sebagai Pembimbing I dan Bapak M. Zulfan Hakim sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung serta untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengalihfungsian Hutan Lindung Di Kabupaten Sinjai.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Kantor DPRD Kabupaten Sinjai serta Kantor Bupati Sinjai dengan melakukan wawancara langsung dengan pemerintah yang terkait dengan alih fungsi hutan lindung di Kabuptaen Sinjai serta mengambil beberapa data yang terkait dengan persoalan yang sedang Penulis teliti sebagai dasar acuan dalam menjawab pertanyaan yang timbul. Selain penelitian lapangan, Penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah serta mengumpulkan informasi dari buku-buku, literatur, undang undang, serta aturan-aturan penunjang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil yang Penulis peroleh dari penelitian ini, yaitu : (1) kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yang memberikan beberapa instruksi terkait dengan perubahan fungsi kawasan hutan dalam hal ini adalah alih fungsi kawasan hutan, namun dari beberapa kewenangan tersebut dalam alih fungsi hutan tidak sesuai dengan peruntukan fungsi dan kriteria-kriteria dalam pengalihfungsian hutan sesuai dengan Peraturan Menteri kehutan Nomor P.34 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kondisi hutan di Sinjai. (2) Alih fungsi kawasan hutan terjadi karena beberapa faktor diantaranya kondisi pasar, tekanan penduduk, sarana dan prasarana serta karena kebijakan pemerintah itu sendiri. Alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Sinjai juga dilakukan oleh pemerintah setempat karena beberapa faktor diantaranya adanya retribusi yang meningkat serta menciptakan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt yang dengan segala kebesarannya, rahmat, karunia, dan kemurahan hati-Nya hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa kehendak Allah swt, segala rintangan dan hambatan tidak akan dapat diatasi dengan baik.

Keberhasilan penulisan skripsi ini juga merupakan buah dari motivasi dan dukungan dari kedua orang tua Penulis, H. Faharuddin dan Hj. Nurjannah yang dengan sabarnya menguatkan hati Penulis pada setiap tahapan perkembangan studi Penulis. Segala doa, harapan, dan bimbingan mereka yang memberi Penulis petunjuk dalam setiap rintangan yang menghambat Penulis.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses tugas akhir ini, banyak sekali pihak yang membantu Penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, maka Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M.Yunus Wahid, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak M. Zulfan Hakim,S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas segala kesabaran, petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang diluangkan untuk penulis;
2. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Wakil Rektor, staf serta jajarannya;

3. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unhas, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unhas, dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unhas;
4. Bapak Prof.Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., dan Ibu Eka Mardekawati Djafar, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas hingga penulis dapat menyelesaikan studinya;
6. Bapak Prof. DR. Suryaman Mustari Pide, S.H., M.H. selaku penasihat akademik penulis atas segala bimbingan yang telah membantu penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Ibunda Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si dan Bapak Zulfan Hakim, S.H., M.H. yang senantiasa memberi dukungan, motivasi dan doa bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga selesai;

8. Saudara penulis, Hj. Nurlindah, S.Pd. dan Nurfaidah Faharuddin, S.Pd atas segala dukungan moril maupun materil dalam penyelesaian studi Penulis. Juga kepada keponakan Penulis Fadhil Khaerul Anam yang selalu menjadi hiburan di hari-hari berat Penulis.
9. Kepala Dinas Kehutana dan Perkebunan Kabupaten Sinjai beserta staff dan seluruh jajarannya, terima kasih atas segala bantuannya selama penulis melakukan penelitian;
10. Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Sinjai beserta staff dan seluruh jajarannya, terima kasih atas segala bantuannya selama penulis melakukan penelitian;
11. Anggota DPRD Kabupaten Sinjai terkhusus Dapil II, terima kasih atas segala bantuannya selama penulis melakukan penelitian;
12. Terima kasih kepada Staff Bagian Akademik Fakultas Hukum Unhas, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Ramalang, Bapak Bunga, Bapak Usman, Kak Lina, Kak Tia, Kak Tri, dan lain-lain yang penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam pengurusan berkas ujian skripsi;
13. Sahabat, teman serta saudaraku Gunawan, Icmi Trihandayani, Fitri Rahmiyani Annas, Andi Mekasari, Sahriningsih, Imam Sasmita Kadir, M.Nur, Aril Surya Ananda, Arini Nur Annisa dan H.Syafaat Anugerah Perdana, yang telah menjadi keluarga Penulis selama tiga tahun terakhir dan mudah-mudahan seterusnya, serta seluruh teman-teman Legitimasi 2010 yang telah banyak membantu Penulis;

14. Teman-teman Penulis di Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (LP2KI) Andi Rinanti, Dzul Ikram, Haedar, Kiki, Sinar, Cindra, Arif, Uni, serta seluruh teman-teman yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu atas seluruh bantuan dan motivasi yang diberikan kepada Penulis;
15. Teman-teman KKN Unhas Gelombang 85 Padang Sumatera Barat, Fajar Humair, Kak Agus, Kak Adi, Kak Yamsir, Samuel, Inayatullah, dan seluruh teman-teman KKN Padang Sumatera Barat angkatan pertama yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu atas segala motivasi dan dukungan yang tidak ternilai harganya ;
16. Teman-Teman SMA Negeri 01 Galesong Utara Oktavian, Rahmat, dan seluruh teman-teman SMA Negeri 01 Galesong Utara angkatan 2007 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu atas segala motivasi dan dukungan yang tidak ternilai harganya ;
17. Saudara-Saudara Pondok Aswad Sahabat Unhas 6, Kak Yusri, Fadli, Ismail, Nurul yang telah memberikan dukungan serta memberikan motivasi selama Penulis menyusun skripsi ini;
18. Seluruh pihak yang membantu Penulis yang tidak dapat Penulis tuliskan satu per satu, terima kasih atas segala semangat, doa, saran yang diberikan kepada Penulis hingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya atas segala perbuatan dan ucapan yang sekiranya tidak berkenan. Segala bentuk



kritik, masukan, dan saran Penulis harapkan guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat berguna di kemudian hari dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 1 Januari 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Abstrak .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A.....	L
atar Belakang Masalah .....	1
B.....	R
umusan Masalah .....	10
C.....	T
ujuan Penelitian .....	10
D.....	M
anfaat Penelitian .....	11

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.....	K
ewenangan Pemerintah Daerah Di Era Otonomi.....	12
1.....	K
ewenangan Desentralisasi Daerah .....	17

2.....	U	
urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah		
.....		19
3.....	K	
ewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Hal		
Pengelolaan Sumber Daya Alam Kehutanan .....		23
B.....	K	
ehutanan Di Indonesia .....		26
1.....	Peng	
ertian Hutan .....		26
2.....	Manf	
aat Hutan .....		27
3.....	Jenis	
Hutan .....		30
4.....	Huta	
n Lindung .....		33
C.....	R	
egulasi Kehutanan Di Indonesia .....		34
1.....	U	
ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia		
Tahun 1945 .....		34
2.....	U	
ndang-Undang dan Peraturan Pengganti Undang-		
Undang (Perpu).....		35

3.....	P	
Peraturan Pemerintah .....		37
4.....	P	
Peraturan Presiden .....		38
5.....	K	
Keputusan Menteri Kehutanan .....		39
D.    Alih Fungsi Hutan Lindung Di Indonesia .....		41
1.    Pengertian dan Tujuan Alih Fungsi Hutan Lindung .....		41
2.    Karakteristik Hutan Lindung yang Dialihfungsikan .....		41
3.    Dampak Alih Fungsi Hutan Lindung .....		44

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.....	L	
Lokasi Penelitian .....		45
B.    Jenis dan Sumber Data .....		45
C.    Teknik Pengumpulan Data .....		46
D.    Teknik Analisis Data .....		46
E.    Teknik Penulisan .....		46
F.    Sistematika Penulisan.....		47

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A.....	I	
Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung ...		48

B.....	F	
aktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai .....		72

## **BAB V PENUTUP**

A.....	K	
esimpulan .....		80
B.....	S	
aran .....		81

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Kawasan Hutan Kabupaten Sinjai.....	51
Tabel 2	Luas Kawasan Hutan dirinci berdasarkan per kecamatan dan kelurahan/desa berdasarkan tataguna kesepakatan daerah Kabupten Sinjai Tahun 2012 .....	51
Tabel 3	Kawasan Hutan yang dialihfungsikan dirinci per-kecamatan Kabupaten Sinjai 2011/2013 .....	56
Tabel 4	Potensi Hutan Pinus di Kabupaten Sinjai .....	65
Tabel 5	Perkembangan PDRB Kabupaten Sinjai Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan (Dalam Juta) Tahun 2006-2010 .....	77
Tabel 6	Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2006-2011 .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Administrasi Kabupaten Sinjai.....	48
Gambar 2	Peta Lereng Kemiringan Kabupaten Sinjai .....	49
Gambar 3	Peta Kawasan Hutan Kabupaten Sinjai .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan adalah suatu areal yang luas dikuasai oleh pohon, tetapi hutan bukan hanya sekedar pohon termasuk di dalamnya tumbuhan kecil seperti lumut, semak belukar dan bunga-bunga hutan. Hutan juga terdapat beranekaragam burung, serangga dan berbagai jenis binatang yang menjadikan hutan sebagai habitatnya<sup>1</sup>.

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciri ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Sebab didalam hutan telah diciptakan segala mahluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Disamping itu, di dalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, yang dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, aset yang terdapat di dalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga

---

<sup>1</sup> Supriadi, 2011. *Hukum Kehutan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 1



dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan<sup>2</sup>.

Sejak awal dekade 1970-an, sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa nonmigas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangunan daerah. Oleh karenanya, guna mempertahankan produktivitasnya sumber daya ini perlu dijaga kelestariannya<sup>3</sup>. Hutan di Indonesia mempunyai peranan penting baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. Namun demikian, sejalan dengan penambahan penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat<sup>4</sup>

Kini kawasan hutan di Indonesia tercatat hanya seluas 104.876.635 atau sekitar 54,6% dari keseluruhan total luas daratan. Rinciannya, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perairan 5.085.209 hektar (terdiri atas 27 unit) dan daratan 18.154.507 hektar (339 unit). Kawasan hutan tersebut terbagi dalam dua kategori. *Pertama*, kawasan suaka alam yang terdiri atas cagar alam 2.283.142 hektar (168 unit) dan suaka margasatwa 3.612.323 hektar (4 unit). Sementara kawasan hutan pelestarian alam meliputi Taman Wisata 299.117 hektar (75 unit), Taman Buru 248.932 hektar (13 unit), Taman Nasional 11.458.993 hektar (30

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 1-2

<sup>3</sup> Ida Ayu Pradnya Resosudarmo, *Tinjauan Kebijakan Sektor Perikanan dan Kebijakan Terkait Lainnya*, dalam Ida Ayu Pradnya Resosudarmo, *Ke mana Melakangka* hlm 196.

<sup>4</sup> Agenda 21 Indonesia, *Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 1996, hlm 13.

unit) dan Taman Hutan Raya 252.089 hektar (11 unit). Selain kawasan suaka alam dan pelestarian alam, luas dan distribusi kawasan hutan juga terdiri atas hutan lindung seluas 30.581.753 hektar yang terdiri atas 472 Daerah Aliran Sungai (DAS). 62 DAS diantaranya termasuk DAS prioritas I, 232 DAS prioritas II dan 176 DAS prioritas III. Terakhir, kawasan hutan produksi yang terdiri atas Hutan Produksi Terbatas (HPT) 17.063.682 hektar, Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas 28.675.881 hektar dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 13.717.786 hektar.<sup>5</sup>

Bertolak dari data luas hutan yang terdapat di Indonesia di atas, untuk mencegah jangan sampai hutan mengalami penyusutan setiap hari, perlu dilakukan suatu pendekatan yang bijak. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan pendekatan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang dilakukan secara terencana dan bijaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan dibidang kehutanan guna mencegah dan meminimalisir kerusakan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Sumber daya hutan memiliki fungsi yang penting sebagai sistem penyangga kehidupan manusia (*The Life Support Sistem*). Untuk mendukung fungsi tersebut pemerintah telah menata kawasan hutan dengan fungsi utamanya masing-masing, yaitu : (1) hutan konservasi untuk tujuan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, (2) hutan lindung untuk tujuan mengatur tata air, mencegah

---

<sup>5</sup> Agung Nugraha, 2004. *Menyongsong Perubahan Menuju Evitalisasi Sektor Kehutanan*. Jakarta : Wirma Aksara. Hlm 58-59

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah dan (3) hutan produksi untuk memproduksi hasil hutan.<sup>6</sup>

Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan kebutuhan terhadap lahan dan hasil hutan juga meningkat. Untuk dapat memenuhi meningkatnya kebutuhan akan lahan dan hasil hutan tersebut, pemerintah memberikan peluang usaha di dalam kawasan hutan tanpa mengubah status dan fungsi kawasan hutan seperti pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk tujuan non kehutanan. Selain itu pemerintah juga telah memberikan kesempatan atau izin dalam melakukan usaha terhadap fungsi kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini biasanya disebut dengan alih fungsi lahan atau alih fungsi hutan.

Alih fungsi lahan atau lazimnya sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagai atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula. Seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi kondisi alih fungsi hutan lindung di beberapa daerah pada saat ini semakin banyak dan mengkhawatirkan bagi kondisi ekologi dan ekosistem sekitarnya. Khususnya pegunungan yang lahan hutan lindungnya menjadi lahan pertanian, lahan perkebunan atau beralih fungsi menjadi perumahan warga yang dilegalkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun

---

<sup>6</sup> Alimuddin Rianse, 2010. *Pengembangan Sistem Kompensasi Areal Hutan Yang Dialihfungsikan (Produk : Model Pengembangan)*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Hlm 1

bentuk penyerobotan karena faktor tingkat penduduk yang semakin bertambah.

Alih fungsi kawasan hutan memang diperbolehkan Undang-Undang. Hanya ada aturannya Pasal 19 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan:“perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu”.Namun, alih fungsi hutan tentu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika alih fungsi hutan ini berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, maka harus ditetapkan oleh pemerintah dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di indonesia sendiri hutan yang telah beralih fungsi berjumlah 125.000 hektar untuk kebutuhan masyarakat setiap tahunnya<sup>7</sup>. hutan yang dialihfungsikan untuk kebutuhan masyarakat seperti pembangunan permukiman, pembukaan lahan perkebunan maupun untuk kebutuhan industri tersebut telah membuat hutan di negara ini semakin berkurang dari tahun ke tahun.Hal ini membuat hutan sebagai paru-paru dunia di negara ini semakin berkurang dan mengancam kelestarian lingkungan.Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 kawasan hutan yang telah dialihfungsikan seluas 270.375,135 ha terdiri atas penggunaan tambang seluas 270.183,58 ha, stasiun klimatologi oleh BMG seluas 0.03 ha, sebagian besar (85.6%) areal pertambangan berada di dalam hutan lindung.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kementerian Kehutanan dan Perkebunan.

<sup>8</sup>Dinas Kehutanan dan Pekebunan Provinsi Sulawesi Selatan, 2008

Hutan yang dapat dialihfungsikan juga hutan yang dapat dikonversi. Namun kenyataannya banyak kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan. Salah satu kasus yang terjadi tentang pengalihfungsian hutan lindung di Indonesia terjadi di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Hutan lindung di Kabupaten Sinjai tersebut telah dialihfungsikan menjadi hutan produksi. Pengalihfungsian hutan lindung tersebut hampir mencapai 100% dijadikan hutan produksi oleh pihak Pemerintah serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai<sup>9</sup>. Hal ini didukung oleh munculnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai mengenai pelaksanaan alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi diantaranya yaitu: (1). Instruksi Bupati Sinjai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kayu Gelondongan Keluar Daerah, (2). Instruksi Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Di Kabupaten Sinjai, dan (3) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai dan/atau Sejenisnya Dalam Wilayah Kabupaten Sinjai.

Adapun mekanisme perubahan fungsi kawasan hutan yang mengacu pada Peraturan Menteri kehutan Nomor P.34 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010, yang terdiri atas perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan dan perubahan fungsi antar fungsi pokok yang berbeda. Ketentuan ini juga berlaku pada kawasan hutan

---

<sup>9</sup>Anggi Stapal, 2010. *Pengalih Fungsian Hutan Lindung Di Kabupaten Sinjai*. Diakses melalui [suarakomunitas.net/baca/9114/pengalihan-fungsi-hutan-lindung-di-kabupaten-sinjai/](http://suarakomunitas.net/baca/9114/pengalihan-fungsi-hutan-lindung-di-kabupaten-sinjai/) [20 Agustus 2013].

konservasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Pemerintah tersebut alih fungsi hutan memang diperbolehkan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 19 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa untuk melakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus didasarkan atas penelitian terpadu yang secara operasional prosedurnya diatur melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2000. Sedangkan pengkajiannya dilakukan oleh tim terpadu sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1615/Kpts-VII/2001. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, kegiatan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan tidak dengan mudah dilaksanakan mengingat di samping perubahan tersebut didasarkan atas kriteria-kriteria sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1992, Keputusan-keputusan Menteri, juga perlu mendapat rekomendasi pemerintah provinsi dan kabupaten, serta harus didasarkan atas pengkajian secara terpadu oleh tim terpadu tersebut. Dan apabila berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis diperlukan persetujuan legislatif.

Adapun kriteria-kriteria dalam melaksanakan perubahan fungsi kawasan hutan yaitu: (1) kelerengan, (2) kelas tanah didasarkan tingkat kepekaannya terhadap erosi, (3) kelas intensitas hujan didasarkan perhitungan rata-rata curah hujan dalam milimeter setahun dibagi dengan rata-rata jumlah hari hujan setahun. Sehingga alih fungsi hutan tidak boleh

dilakukan dengan seenaknya saja dan harus mengikuti kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang terkait.

Terkait dengan kasus alih fungsi hutan di Indonesia, penulis menumakan fakta yaitu kasus yang terjadi tentang pengalihfungsian hutan lindung di Indonesia yang terjadi di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Hutan lindung di Kabupaten Sinjai tersebut telah dialihfungsikan menjadi hutan produksi. Pengalihfungsian hutan lindung tersebut hampir mencapai 100% dijadikan hutan produksi oleh pihak Pemerintah serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai. Penulis menganggap bahwa alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Sinjai tersebut melanggar ketentuan-ketentuan dalam mengalihfungsikan hutan lindung. Hal ini ditunjukkan pada kriteria kelerengan hutan lindung di kabupaten sinjai yang tidak memenuhi kriteria dalam pengalihfungsian hutan. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa hutan lindung dengan lereng kemiringan 45', seharusnya di tanami dengan pohon atau kayu berjenis endemik, contohnya, kemiri, rotan, enau, damar, dan lain-lain. Akan tetapi hal ini berbeda dengan pengalihfungsian hutan lindung di Kabupaten Sinjai yang dimana Pemerintah tersebut mengalihfungsikan ke lahan hutan pinus. Sehingga terhadap hal tersebut pada tahun 2006 terjadi peristiwa bencana longsor di kawasan hutan lindung yang dijadikan hutan produksi<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Suara Komunitas, 2010

Selain permasalahan di atas, permasalahan lain yang juga sangat urgen terkait dengan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Sinjai adalah dimana Pemerintah telah melanggar penerapan moratorium konversi hutan alam sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 603/Menhutbun-VIII/2000 jo surat Menhut No. 1712/Menhut-VII/2001 yang ditujukan kepada gubernur dan bupati seluruh Indonesia. Dengan adanya penerapan moratorium konversi hutan alam tersebut, maka sejak 7 Juni 2000 Departemen Kehutanan tidak lagi mengeluarkan ijin alih fungsi kawasan hutan untuk kegiatan pelepasan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan budidaya pertanian/perkebunan<sup>11</sup>. Hal inilah sehingga penulis menganggap bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai tidak memperhatikan adanya moratorium tersebut karena sampai saat ini hampir 100% hutan lindung dijadikan Hutan Produksi dengan lahan hutan pinus. Luas lahan hutan pinus di Kabupaten Sinjai sampai saat ini mencapai adalah 3.155 ha dengan jumlah pohon 1.009.200 pohon<sup>12</sup>. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam Alih Fungsi Hutan Lindung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis kemudian menarik beberapa rumusan masalah untuk menjadi objek pembahasan lebih lanjut, yaitu :

---

<sup>11</sup> Koes Saparadji, 2002. *Alih Fungsi Kawasan Hutan Hanya Untuk Optimalisasi Fungsi Kawasan Hutan*. Diakses melalui [www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1587](http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1587) [09 September 2013]

<sup>12</sup> Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone, 2009.



- a. Bagaimanakah Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung ?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengalihfungsian hutan lindung di Kabupaten Sinjai ?

**C. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk Mengetahui Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung.
- b. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengalihfungsian Hutan Lindung Di Kabupaten Sinjai.

**D. Manfaat Penulisan**

- a. Diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui pengalihfungsian hutan lindung di Kabupaten Sinjai.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kewenangan Pemerintah Daerah Di Era Otonomi**

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintah dalam melakukan penataan kewenangan, organisasi perangkat daerah, penataan relokasi personil, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Sejak ditetapkannya kedua undang-undang tersebut di atas, sudah banyak langkah dan kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat segera terlaksana<sup>13</sup>.

Khusus menyangkut penataan kewenangan dan kelembagaan bahwa sesuai dengan Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 188/1500/PUMDA tanggal 22 Desember 2000, perihal penataan dan kewenangan dan kelembagaan dapat dijelaskan secara global dan implisit sebagai berikut: (1) Penataan Kewenangan bidang pemerintahan menjadi kewenangan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD; (2) Rujukan Kegiatan penataan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bagian-bagian dari berbagai

---

<sup>13</sup>HAW. Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 8

bidang pemerintahan (yang pada waktu itu sudah disebut urusan pemerintahan) serta kewenangan lain yang sudah diserahkan kepada kabupaten/kota yang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut, dan (3) Prinsip-prinsip penataan kewenangan adalah sebagai berikut : *pertama*, sesuai dengan penetapan dan kemampuan daerah, terdapat bidang pemerintahan yang tidak sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, termasuk sebelas bidang pemerintahan yang wajib diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maksudnya ada bagian-bagian dari sebelas bidang pemerintahan wajib ini yang apabila tidak dilaksanakan oleh kabupaten/kota akan ditangani oleh provinsi dan atau pemerintah pusat atau oleh kabupaten/kota tetangga.

*Kedua*, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, departemen-departemen wajib menyiapkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal dan selanjutnya provinsi juga wajib menentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM). *Ketiga*, berdasarkan penjelasan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bidang-bidang dari berbagai bidang pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan oleh kabupaten/kota tidak dilakukan penyerahan secara aktif oleh pemerintah pusat, tetapi melalui pengakuan oleh pemerintah<sup>14</sup>.

Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm 9 – 10

terutama dalam mengembangkan kehidupan yang demokratis. Otonomi daerah mendorong upaya pemberdayaan masyarakat, memperkuat kedudukan dan kemampuan pemda, meningkatkan pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan daerah<sup>15</sup>. Hakekat otonomi daerah adalah kebebasan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi dan karakteristik kebutuhan daerah itu sendiri.

Sebenarnya desentralisasi atau otonomi daerah sudah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bahkan sudah jauh saat Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda<sup>16</sup>. Setelah kemerdekaan, sistem otonomi daerah lebih jauh diatur melalui peraturan perundangan seperti UU No. 22/1948 yang kemudian diperbaharui oleh UU No. 1/1957. Selain itu peraturan perundangan lainnya juga diterbitkan seperti UU No. 18 /1965, UU No. 5/1974, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004<sup>17</sup>

Prinsip-prinsip pengaturan kewenangan pemerintah antara lain: (1) pada dasarnya semua kewenangan pemerintahan diserahkan kepada daerah, kecuali bidang pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal, peradilan, agama serta kewenangan pemerintah lainnya yang secara nasional lebih berdaya guna dan berhasil guna jika diurus oleh pemerintah pusat; (2) penyerahan kewenangan pemerintah

---

<sup>15</sup> Maklin, A.R. 2000. *Desentralisasi Urusan Kehutanan dan Pembangunan Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah. Prosiding Seri Lokakarya IV. Desentralisasi Urusan Kehutanan dan Program Kehutanan Nasional. Jakarta, 19-20 September 2000.* Jakarta : Airlangga. Hlm 5

<sup>16</sup> Dermawan, A. 2004. *Otonomi dan keuangan daerah: Implikasi-implikasinya untuk sektor kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.* CIFOR. Bogor. Hlm 23

<sup>17</sup> Ibid, hlm 24

kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan, SDM, sarana dan prasarana; dan (3) pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah didasarkan pada norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah<sup>18</sup>.

Beberapa unsur pokok yang perlu dipertimbangkan agar pelaksanaan otonomi daerah lebih efektif, yaitu: (1) kelembagaan yang demokratis, efektif dan efisien, (2) tersedianya sumber daya aparatur daerah yang memadai, (3) kekuatan ekonomi daerah yang dapat digerakkan sebagai sumber PAD, (4) pemberian insentif fiskal dan non fiskal guna mengembangkan potensi daerah, dan (5) pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan proporsional secara riil.

Sebagian berpandangan bahwa ketika UU No. 22/1999 diberlakukan, pemerintah kabupaten/kota cenderung lebih memanfaatkan kewenangan untuk mendorong pembangunan daerah dan eksploitasi sumberdaya demi peningkatan PAD. Dalam beberapa kasus, rambu-rambu aturan seperti UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas KKN cenderung diabaikan karena tidak berjalannya pengawasan dari pusat. Ketika kasus penyimpangan oleh pemerintah kabupaten/ kota terjadi, misalnya, kepala daerah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat tidak mampu berbuat apa-apa dan cenderung diremehkan dengan alasan tidak adanya hierarki antar tingkat pemerintahan, yang berakibat tidak adanya pengawasan dari pemerintah

---

<sup>18</sup> Maklin, A.R. 2000. *Desentralisasi Urusan Kehutanan dan Pembangunan Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah. Prosiding Seri Lokakarya IV. Desentralisasi Urusan Kehutanan dan Program Kehutanan Nasional*. Jakarta : LIPI Pers. Hlm 35

di atasnya. Hal ini yang antara lain memicu tuntutan adanya perubahan UU No. 22/1999 yang direvisi melalui UU No. 32/2004 yang memberikan wewenang kepada Gubernur sebagai pembina dalam pelaksanaan otonomi kabupaten dan kota dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat<sup>19</sup>

Dalam konsiderannya, UU No. 32/2004 menyebutkan perlunya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global. Kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. UU No. 22/1999 direvisi karena dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Sebenarnya UU No. 32/2004 masih menggunakan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang tercantum dalam UU No. 22/1999. Namun, kebijakan yang baru lebihdiarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, seperti yang tertuang dalam salah satu konsiderannya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm 38-39

<sup>20</sup> Subarudi, 2007. *Otonomi Daerah Bidang Kehutanan: Implementasi dan Tantangan Kebijakan Perimbangan Keuangan*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR). Hlm

Undang-Undang No. 32/2004 memberikan kewenangan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mencabut perda-perda yang tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih atas. Posisi Gubernur yang lebih kuat dari sebelumnya terlihat dari tugas dan wewenang tambahan sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan otonomi kabupaten/ kota, selain tentunya menjadi penyelenggaraan urusan pemerintah.

#### 1. Kewenangan Desentralisasi Daerah

Proses peralihan dari sistem dekosentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintahan daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkembangkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Desentralisasi telah lama dianut dalam negara Indonesia. Secara historis asas desentralisasi itu telah dilaksanakan itu telah dilaksanakan di zaman Hindia Belanda dengan adanya Undang-Undang Desentralisasi (*Desentralisasi Wet*) tahun 1903.<sup>21</sup>

Tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah ini adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga

---

<sup>21</sup> Syamsuddin Aris, 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : LIPI Pers. Hlm 51

pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan kontrol masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil apabila pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Desentralisasi kewenangan tersebut akan berakhir dengan semakin meningkatnya peranserta masyarakat dan berubahnya peran pemerintah dari *provider* menjadi fasilitator.

## 2. Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah

Pada konsep Negara Kesatuan, semua wewenang milik pemerintah pusat tetapi pemerintah pusat tidak dapat melaksanakan seluruh kewenangannya, kemudian sebagian wewenangnya tersebut diserahkan pada daerah. Hal ini disebut desentralisasi karena ada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka terbentuklah hierarki kekuasaan. Pembagian kekuasaan terdapat pada Pasal 18 UUD NRI 1945 dan Pasal 2 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut menerangkan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia itu dibagi dan memiliki pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas



pembantuan. Dari pasal tersebut secara eksplisit tercermin bahwa Negara kesatuan tidaklah sentralistik<sup>22</sup>.

Menurut Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, kekuasaan negara terletak pada pemerintah pusat, bukan pada pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaan pada pejabat-pejabatnya di daerah dalam rangka dekonsentrasi atau pada Kepala daerah berdasarkan hak otonomi dalam rangka desentralisasi<sup>23</sup>.

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang tentang pemerintahan daerah ini ditentukan menjadi urusan pemerintah (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama). Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>24</sup>

Pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota

---

<sup>22</sup> Sarundajang. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Kedaerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 48.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 49

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 49

ke desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dalam kaitan ini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, antara lain perlindungan hak konstitusional; perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia; pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Sedangkan urusan pilihan dalam kaitan ini adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah<sup>25</sup>.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: (a). perencanaan dan pengendalian pembangunan; (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (d) penyediaan sarana dan prasarana umum; (e) penanganan bidang kesehatan; (f) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; (g) penanggulangan masalah sosial lintas

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 49-50

kabupaten/kota; (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; (j) pengendalian lingkungan hidup; (k) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; (l) pelayanan kependudukan dan catatan sipil; (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; (n) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; (o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan (p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan<sup>26</sup>.

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah provinsi yang bersangkutan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan berskala kabupaten/kota meliputi :

(a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (d) penyediaan sarana dan prasarana umum; (e) penanganan bidang kesehatan; (f) penyelenggaraan pendidikan; (g) pelayanan bidang ketenagakerjaan; (h) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; (i) pengendalian lingkungan hidup; (j) pelayanan pertanahan; (k) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; (l) pelayanan administrasi umum pemerintahan; (m) pelayanan administrasi penanaman modal; (n) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan (o) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan<sup>27</sup>.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>27</sup> Lihat Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, hubungan pusat-daerah dalam bidang kewenangan akan terlihat dalam pelaksanaan berbagai urusan yang bersifat *concurrent* dan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

### 3. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Hal Pengelolaan Sumber Daya Alam Kehutanan

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sumber daya alam kehutanan melalui perubahan kebijakan di sektor kehutanan dengan direvisinya PP No. 34/2002 menjadi PP No. 6/2007 yang mengatur tata hutan, perencanaan kehutanan dan pemanfaatan hutan. Selain mempertegas kembali kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengurusan hutan dan meluasnya opsi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui berbagai strategi kebijakan. Berdasarkan PP 25/1999, pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen kehutanan, secara garis besar mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang mendukung pembangunan secara makro, rencana makro kehutanan, dan kriteria dan standar. Departemen kehutanan juga berwenang mengatur penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang kehutanan dan menyelenggarakan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan di

hutan produksi dan pengusahaan pariwisata alam yang eksternalitasnya lintas provinsi<sup>28</sup>.

Departemen kehutanan telah menetapkan visinya untuk periode 2004-2009 yang juga sudah mendapatkan persetujuan DPR yakni *"terwujudnya penyelenggaraan kehutanan untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat"*. Misi Dephut yang terkait langsung dengan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara lain (1) mewujudkan aparat dan lembaga pemerintahan yang bersih, kuat dan berwibawa serta melayani masyarakat, (2) membangun kebersamaan pembangunan dan kemitraan yang setara antar pihak terkait (*stakeholders*), (3) mengoptimalkan fungsi sumber daya yang meliputi ekonomi, ekologi dan sosial secara seimbang dan lestari dengan mengedepankan prinsip konservasi di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati, (4) mewujudkan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara proporsional, berkeadilan, berwawasan lingkungan untuk menciptakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, (5) mewujudkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab, (6) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan selaras dengan semangat otonomi daerah, (7) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan, dan (8) memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Subarudi, 2007. *Otonomi Daerah Bidang Kehutanan: Implementasi dan Tantangan Kebijakan Perimbangan Keuangan*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR). Hlm 7

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 7-8

Dalam rencana kerja untuk periode tahun 2005-2009, Dephut telah menetapkan sasaranprioritas antara lain: (1) Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang didukung oleh stakeholders dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pelestarian sumber daya hutan; (2) Pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal; (3) Penambahan pembangunan hutan tanaman sehingga mencapai seluas 5 juta ha dan rehabilitasi hutan seluas 5 juta ha; (4) Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari antara lain dengan membangun minimal satu unit pengelolaan hutan di setiap provinsi; (5) Revitalisasi dan pengembangan hutan rakyat terutama di luar pulau Jawa; (6) Pengembangan aneka usaha kehutanan nonkayu dan jasa lingkungan secara komersial; (7) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 3-10% dan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebesar 3-4%.<sup>30</sup>

Desentralisasi kehutanan sebagai kebijakan prioritas Dephut mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Jika dalam periode sebelumnya (1999-2003) penguatan desentralisasi menjadi salah satu kebijakan prioritas, maka untuk periode 2004-2009, desentralisasi pengurusan kehutanan menjadi salah satu kebijakan pendukung dari lima kebijakan prioritas kehutanan tahun 2004-2009, yang antara lain mencakup penanganan pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal, revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, rehabilitasi

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm 8

dan konservasi sumber daya hutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dan pemantapan kawasan hutan.

## **B. Kehutanan Di Indonesia**

### **1. Pengertian Hutan**

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan adalah suatu areal yang luas dikuasai oleh pohon, tetapi hutan bukan hanya sekedar pohon termasuk di dalamnya tumbuhan kecil seperti lumut, semak belukar dan bunga-bunga hutan. Hutan juga terdapat beranekaragam burung, serangga dan berbagai jenis binatang yang menjadikan hutan sebagai habitatnya<sup>31</sup>.

Suatu kumulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah luarnya. Jika kita berada di hutan tropis, rasanya seperti masuk ke dalam ruang sauna yang hangat dan lembab, yang berbeda daripada daerah perladangan sekitarnya. Pemandangannyapun berlainan. Ini berarti segala tumbuhan lain dan hewan hingga sekecil-kecilnya, serta beraneka unsur tak hidup lain termasuk bagian-bagian penyusun yang tidak terpisahkan dari hutan.

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu

---

<sup>31</sup> Supriadi, 2011. *Hukum Kehutan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 1

yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem, hutan sangat penting dari berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan hutan adalah tempat bertumbuhnya berjuta tanaman.

Sebagai bagian dari cagar lapisan biosfer, hutan memiliki banyak fungsi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk di muka bumi. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun sangat memerlukan lahan untuk kelangsungan hidupnya. Kawasan yang ditumbuhi pepohonan tersebut akan dikatakan hutan apabila kawasan ini mampu menciptakan sebuah iklim dan kondisi yang khas di daerah itu.

## 2. Manfaat Hutan

Fungsi hutan itu sangat penting, hal ini di buktikan bahwa pada 21 Januari 2004 Presiden Megawati merasa perlu mencanangkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) yaitu gerakan moral yang melibatkan semua komponen masyarakat bangsa untuk memperbaiki kondisi hutan dan lahan kritis. Dengan harapan, agar lahan kritis itu dapat berfungsi optimal, yang juga pada gilirannya bermanfaat bagi masyarakat sendiri. Tujuan melibatkan komponen masyarakat, tentu saja agar mereka menyadari bahwa hutan dan lingkungan itu sangat penting dijaga kelestariannya.



Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa :

Ayat (1) hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu : (a) fungsi konversi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Ayat (2) pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut : (a) fungsi konservasi, (b) fungsi lindung, dan (c) fungsi produksi.

Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, hal ini juga ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 ayat (2), sebagai berikut :

(a) Kawasan Hutan Konservasi yang terdiri dari kawasan suaka alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam), dan Taman Baru. (b) Hutan Lindang, dan (c) Hutan Produksi.

Selain manfaat hutan di atas, manfaat hutan juga sebagai sumber daya alam, fungsi hutan dalam pembangunan, serta manfaat hutan dalam masyarakat. Secara umum klasifikasi sumberdaya alam terbagi kedalam bentuk:<sup>32</sup> (a). Lahan Pertanian, (b). Hutan dengan aneka ragam hasilnya, (c). Lahan alami untuk keindahan, rekreasi atau untuk penelitian ilmiah, (d). Perikanan darat dan laut, (e). Sumber Mineral Bahan Bakar dan Non Bahan Bakar, (f). Sumber energi nonmineral seperti: panas bumi, tenaga sury, angin, sumber tenaga air, gelombang pasang. Hutan sebagai bagian

---

<sup>32</sup> Zain, AS. 1996. Hukum lingkungan Konservasi Hutan. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 5

dari sumberdaya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan lingkungan hidup. Telah diterima sebagai kesepakatan internasional bahwa hutan yang berfungsi penting bagi kehidupan dunia, harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem dunia.

Kemudian fungsi hutan dalam pembangunan dimana sumber daya alam terbaharui harus dikelola sedemikian rupa sehingga fungsinya dapat selalu dipelihara. Sumberdaya alam yang tidak terbaharukan harus digunakan sehemat mungkin dan diusahakan hasilnya selama mungkin. Pembangunan kehutanan harus makin diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan hutan bagi industri dalam negeri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya.

Tujuan maupun manfaat terhadap peran hutan yang terakhir bagi masyarakat. Dimana hutan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Peranan hutan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat direalisasikan dalam bentuk antara lain <sup>33</sup>: (a) hutan kemasyarakatan, yang berdasar pada Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan No. 677/Kpts-II/1998, hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh menteri untuk dikelola oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan kepentingan kesejahteraan masyarakat, (b) hutan

---

<sup>33</sup> Ibid, hal 6

rakyat, dimana hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik dengan luas minimal 0.25 ha. Penutupan tajuk didominasi oleh tanaman perkayuan, dan atau tanaman tahun pertama minimal 500 batang<sup>34</sup>. Penanaman pepohonan di tanah milik masyarakat oleh pemiliknya, merupakan salah satu butir kearifan masyarakat dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dengan semakin terbatasnya kepemilikan tanah, peran hutan rakyat bagi kesejahteraan masyarakat semakin penting. Pengetahuan tentang kondisi tanah dan faktor-faktor lingkungannya untuk dipadukan dengan pengetahuan jenis-jenis pohon yang akan ditanam untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh pemilik lahan, merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan hutan rakyat<sup>35</sup>.

### 3. Jenis Hutan

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan yang luas di dunia. Luas hutan tersebut dulu mencapai 113 juta hektar dan terus berkurang drastis akibat kebodohan oknum pemerintah dan penjahat yang selalu haus uang dengan membat dan menggunduli hutan demi mendapat keuntungan yang besar tanpa melihat dampak bagi lingkungan global. Berikut di bawah ini adalah pembagian macam-macam / jenis-jenis hutan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia disertai arti

---

<sup>34</sup> Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. Panduan Kehutanan Indonesia. Dephutbun RI. Jakarta.

<sup>35</sup> Zain, AS. 1997. *Aspek Pembinaan kawasan Hutan dan stratifikasi Hutan Rakyat*. Penerbit Rineka cipta. Jakarta. Hal 20

definisi dan pengertian<sup>36</sup> : (1) Hutan Bakau, adalah hutan yang tumbuh di daerah pantai berlumpur. Contoh : pantai timur kalimantan, pantai selatan cilacap, dan lain-lain, (2) Hutan sabana, adalah hutan padang rumput yang luas dengan jumlah pohon yang sangat sedikit dengan curah hujan yang rendah. Contoh : Nusa tenggara, (3) Hutan rawa, adalah hutan yang berada di daerah berawa dengan tumbuhan nipah tumbuh di hutan rawa. Contoh : Papua selatan, Kalimantan, (4) Hutan hujan tropis, adalah hutan lebat / hutan rimba belantara yang tumbuh di sekitar garis khatulistiwa / ekuator yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Hutan jenis yang satu ini memiliki tingkat kelembapan yang tinggi, bertanah subur, humus tinggi dan basah serta sulit untuk dimasuki oleh manusia. Hutan ini sangat disukai pembalok hutan liar dan juga pembalok legal jahat yang senang merusak hutan dan merugikan negara trilyunan rupiah. Contoh : hutan kalimantan, hutan sumatera, (5) Hutan musim, adalah hutan dengan curah hujan tinggi namun punya periode musim kemarau yang panjang yang menggugurkan daun di kala kemarau menyelimuti hutan.

Disamping itu jenis hutan juga dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu<sup>37</sup> : (1). Hutan wisata, adalah hutan yang dijadikan suaka alam yang ditujukan untuk melindungi tumbuh-tumbuhan serta hewan / binatang langka agar tidak musnah / punah di masa depan. Hutan suaka alam dilarang untuk ditebang dan diganggu dialih fungsi sebagai buaka hutan. Biasanya hutan wisata menjadi tempat rekreasi orang dan tempat

---

<sup>36</sup> Rahmi Hidayanti, 2006. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Pelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Tangerang : Wana Aksara. Hlm 10

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 11

peneliti,. (2) Hutan cadangan, merupakan hutan yang dijadikan sebagai lahan pertanian dan pemukiman penduduk. Di pulau Jawa terdapat sekitar 20 juta hektar hutan cadangan, (3) Hutan lindung, adalah hutan yang difungsikan sebagai penjaga ketertaturan air dalam tanah (fungsi hidrolisis), menjaga tanah agar tidak terjadi erosi serta untuk mengatur iklim (fungsi klimatologis) sebagai penanggulang pencemaran udara seperti CO<sub>2</sub> (karbon dioksida) dan CO (karbon monoksida). Hutan lindung sangat dilindungi dari kerusakan penebangan hutan membabitnya yang umumnya terdapat di sekitar lereng dan bibir pantai, (4) Hutan produksi yaitu adalah hutan yang dapat dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Hutan produksi dapat dikategorikan menjadi dua golongan yakni hutan rimba dan hutan budidaya. Hutan rimba adalah hutan yang alami sedangkan hutan budidaya adalah hutan yang sengaja dikelola manusia yang biasanya terdiri dari satu jenis tanaman saja. Hutan rimba yang diusahakan manusia harus menebang pohon dengan sistem tebang pilih dengan memilih pohon yang cukup umur dan ukuran saja agar yang masih kecil tidak ikut rusak.

#### 4. Hutan Lindung

Hutan dapat didefinisikan sebagai asosiasi tumbuh-tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohonan dengan luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi tertentu<sup>38</sup>. Definisi ini memiliki kemiripan dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

---

<sup>38</sup>Suparmoko. 1997. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*. Yogyakarta. BPFE. Hlm 98

Dalam pasal ini, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan hidup dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dinyatakan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah (Pasal 1 huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan). Menurut Riyanto hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperlukan antara lain untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, yaitu proses hidroorologi, proses penyuburan tanah, proses keanekaragaman hayati, proses penyehatan lingkungan dan manfaat lainnya<sup>39</sup>.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) poin (b) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan dinyatakan bahwa kriteria hutan lindung adalah kawasan hutan yang memenuhi salah satu kriteria berikut :

- (1) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih, (2) Kawasan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh per seratus) atau lebih, (3) Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2 000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut, (4) Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapang lebih dari 15% (lima belas per seratus), (5) Kawasan hutan yang merupakan daerah

---

<sup>39</sup> Riyanto, B. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam*. Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor. Hlm 30

resapan air, (6) Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

### **C. Regulasi Kehutanan Di Indonesia**

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

Dalam hukum Tata Negara, posisi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam artian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber segala peraturan perundang-undangan, karena darisanalah semua hukum positif merupakan penjabaran yang lebih rinci dari peraturan yang bersifat umum yang terdapat dalam UUD 1945. Keterkaitan antara UUD 1945 sebagai sumber hukum kehutanan dapat dilihat atau termaktub dalam pasal 33 ayat (3) yang dinyatakan bahwa :

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) ini dapat disimpulkan (1) memberikan “hak penguasaan” kepada negara atas seluruh sumber daya alam di Indonesia; (2) kewajiban kepada negara untuk mengelola sumber daya alam tersebut untuk kemakmuran sebesar-besarnya seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, secara konseptual ketentuan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan filosofi dan landasan ekonomi pembentukan peraturan hukum kehutanan, dan

yang akan dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan hukum positif dan peraturan pelaksanaan lainnya<sup>40</sup>.

## 2. Undang-Undang dan Peraturan Pengganti UU (Perpu)

Keberadaan Undang-Undang dalam tata urutan peraturan perundang-undang di Indonesia berada di bawah UUD 1945 dan merupakan produk hukum yang sangat strategis karena kehadirannya disetujui oleh eksekutif (Presiden) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). Selain itu, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) merupakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya implementatif, yakni mengatur segala hal yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan dan lain-lain. Dasar hukum keberadaan undang-undang sebagai hasil persetujuan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berkaitan dengan ketentuan yang termuat Pasal 5 ayat (1) di atas yang merupakan rujukan dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan, baik peraturan perundang-undangan yang bersentuhan langsung dengan kehutanan maupun yang tidak berkaitan langsung. Adapun peraturan perundang-undangan yang bersentuhan langsung dengan hukum kehutanan yakni : (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

---

<sup>40</sup> Supriadi, 2011. *Hukum Kehutan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 8



1990 tentang Konservasi Hayati (UUKY). Sementara itu, undang-undang yang berhubungan tidak langsung dengan hukum kehutanan, yaitu : (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan UU Nomor 26 Tahun 2007; (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam perjalanannya mengalami perubahan dengan adanya protes dari beberapa perusahaan pertambangan yang telah mendapatkan izin pengelolaan pemerintah, khususnya perusahaan pertambangan yang mendapatkan konsesi di kawasan hutan, baik hutan produksi maupun hutan lindung. Menyikapi masalah ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374)<sup>41</sup>.

### 3. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah merupakan peraturan yang kewenangan sepenuhnya dikeluarkan oleh Presiden sebagai kepala Pemerintahan

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm 9

tertinggi dalam Pengelolaan Negara Republik Indonesia. Keberadaan Peraturan Pemerintah diadakan sebagai peraturan pelaksanaan dari sebuah undang-undang, sehingga keberadaannya bersifat implementatif dan masih perlu ditindaklanjuti oleh peraturan yang lebih rendah, misalnya Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri maupun Peraturan Daerah. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengaturan kebijaksanaan di bidang hukum kehutanan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah dapat dilihat sebagai berikut : (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan dan Hutan Produksi; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hukum Kota<sup>42</sup>.

#### 4. Peraturan Presiden

Dalam Peraturan Presiden pada kenyataannya atau praktiknya terdapat dua muatan, yakni Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden kalau muatannya berkaitan dengan pengangkatan seorang pejabat, misalnya pengangkatan menteri, gubernur, rektor dan lain-lain. Sementara itu, jika Presiden akan mengeluarkan Peraturan Presiden, maka muatannya muatannya berkaitan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 9-10

dengan peraturan yang lebih rinci yang menjelaskan suatu masalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan, misalnya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.

Berkaitan dengan pengaturan hukum kehutanan yang diatur dengan Keputusan Presiden, di antaranya: (1) Keppres Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; (2) Keppres Nomor 40 Tahun 1993 tentang Dana Reboisasi; (3) Keppres Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengenaan, Pemungutan, dan Pembagian Iuran Hasil Hutan; (4) Keppres Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; dan (5) Keppres Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. Namun pada dasarnya kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Menteri tidak dikenal, tetapi Keputusan Menteri ini, dapat dikategorikan kedalam peraturan pemerintah, bukan dalam artian Peraturan Pemerintah yang sejajar dengan PP, tetapi Keputusan Menteri ini merupakan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana teknis kebijakan di bidang pembangunan masing-masing sektor yang di bidang oleh Menteri<sup>43</sup>.

##### 5. Keputusan Menteri Kehutan

Menteri sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 11

dengan pelaksanaan tugasnya yang lazim disebut Keputusan Menteri. Dalam kaitannya dengan pengaturan bidang kehutanan yang diatur dengan Keputusan Menteri Kehutanan dapat dikemukakan, di antaranya:

(1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6884/KPTS-II/2002 tanggal 12 Juli 2012 tentang Kriteria dan Tata Cara Evaluasi terhadap Industri Priemer Hasil Hutan Kayu; (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6885/KPTS-II/2002 tanggal 12 Juli 2012 tentang Tata Cara Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan; (3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 178/KPTS-II/2003 tanggal 12 Juli 2003 tentang Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Unit Manajemen dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari; (4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.279/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri kehutanan Nomor: 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan tanggal 2 Agustus 2004; (5) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: P. 26/ Menhut-II/2005 tanggal 16 Agustus 2005 tentang Pedoman Pemnfaatan Hutan Hak; (6) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: P. 20/Menhut-II/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman; (7) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: P. 03/ Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota; dan (8) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: P. 18/ Menhut-II/2005 tanggal 13

Juli 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 126/ KPTS-II/2003 tentang Penataan Hasil Hutan<sup>44</sup>.

#### **D. Alih Fungsi Hutan Lindung Di Indonesia**

##### **1. Pengertian dan Tujuan Alih Fungsi Hutan Lindung**

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula, seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi Kondisi alih fungsi hutan lindung di beberapa daerah pada saat ini semakin banyak dan mengkhawatirkan bagi kondisi ekologi dan ekosistem sekitarnya, khususnya daerah pegunungan yang lahan hutan lindungnya menjadi lahan pertanian, lahan perkebunan atau beralih fungsi menjadi perumahan warga yang di legalkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun bentuk penyerobotan karena faktor tingkat penduduk yang semakin bertambah. Pertumbuhan penduduk merupakan masalah utama, karena dengan kepadatan penduduk akan berimplikasi pada masalah-masalah yang krusial di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, politik, hukum, keamanan dan ilmu pengetahuan<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>45</sup> Supartman, 1997. *Kajian Nilai Hutan; Studi Kasus Fungsi Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi Pada Areal Hutan Gowa- Maros*. Tesis

## 2. Karakteristik Hutan Lindung yang Dialihfungsikan

Penetapan suatu kawasan hutan negara didasarkan atas terpenuhinyakarakteristik dimensi fungsi hutan. Sedangkan fungsi kawasan hutan denganluas lahan di bawahnya diklasifikasikan berdasarkan bentangan daerah aliransungai (DAS), karena DAS mewakili topografi yang mencerminkan klasifikasikarakteristik tingkat resiko eksternalitas negatif dari pengelolaannya terhadapkepentingan umum kehidupan secara menyeluruh (sebesar besarnya bagikemakmuran rakyat), yaitu semakin besar kemiringan lahan dan semakin tinggilahan dari atas permukaan laut serta semakin dekat dengan sumber-sumberair semakin besar potensi eksternalitas negatif pengelolaannya<sup>46</sup>.

Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan menurut Badan Planologi Departemen Kehutanan: 1) Penetapan fungsi kawasan hutan adalah pemberian kepastian hukum mengenai fungsi suatu kawasan hutan tetap dengan Keputusan Menteri serta 2) Pinjam pakai kawasan adalah penyerahan penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut<sup>47</sup>.

Adapun beberapa kriteria penetapan hutan didasarkan pada faktor-faktor kelas lereng lapangan, kelas tanah dan kelas intensitas hujan

---

<sup>46</sup> Eko Nurmijayanto, 2008. *Analisis Kawasan Hutan Dan Kawasan Lindung Dalam Rangka Arahana Penataan Ruang Di Kabupaten Deli Serdang*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Hlm 18

<sup>47</sup> [BAPLAN] Badan Planologi Kehutanan. 2005. *Kajian penataan Ruang dalam Rangka Pemantapan Kawasan Hutan*.

menurut Badan Planologi Departemen Kehutanan : (1) kelerengam, (2) Kelas tanah didasarkan tingkat kepekaannya terhadap erosi, (3) Kelas intensitas hujan didasarkan perhitungan rata-rata curah hujan dalam milimeter setahun dibagi dengan rata-rata jumlah hari hujan setahun<sup>48</sup>.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 19 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa untuk melakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus didasarkan atas penelitian terpadu yang secara operasional prosedurnya diatur melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2000. Sedangkan pengkajiannya dilakukan oleh tim terpadu sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1615/Kpts-VII/2001. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, kegiatan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan tidak dengan mudah dilaksanakan mengingat di samping perubahan tersebut didasarkan atas kriteria-kriteria sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1992, Keputusan-keputusan Menteri, juga perlu mendapat rekomendasi pemerintah provinsi dan kabupaten, serta harus didasarkan atas pengkajian secara terpadu oleh tim terpadu tersebut. Dan apabila berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis diperlukan persetujuan legislatif.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Badan Planologi Kehutanan. 2005

### 3. Dampak Alih Fungsi Hutan Lindung

Banyaknya alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya hal ini semakin meningkatkan resiko terjadinya bencana banjir & longsor di Indonesia. Pulau Jawa merupakan daerah yang memiliki banyak daerah rawan longsor karena tingkat kerusakan hutan lindung di Pulau Jawa sendiri tiap tahunnya mencapai 19.000 Ha. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan kawasan-kawasan lindung termasuk kawasan rawan bencana longsor dalam RTRW Nasional dan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penataan ruang diwilayahnya.

Pada umumnya penyebab kejadian banjir & longsor karena terjadi perubahan alih fungsi hutan lindung sehingga air permukaan meningkat. Disisi lain banyak permukiman yang dibangun di perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 40 persen yang seharusnya kawasan lindung<sup>49</sup>. Saat ini pengelolaan hutan lindung belum terorganisir dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur pengelolaan hutan lindung sebagai bentuk tindak lanjut dari otonomi daerah. Tentu saja, kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dan PP Nomor 6 tahun 2007.

---

<sup>49</sup> *Op. Cit*, Supratman.hlm 56



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kabupaten Sinjai. Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini, penulis menetapkan lokasi penelitian Di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Kantor DPRD Kabupaten Sinjai serta Kantor Bupati Sinjai. Adapun pemilihan tempat atau lokasi penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa: data luas hutan di Kabupaten Sinjai , data hutan lindung di Kabupaten Sinjai, Data pengalihfungsian hutan di Kabupaten Sinjai serta melakukan wawancara terhadap pemerintah yang terkait.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, majalah dan situs internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. data primer melalui penelitian secara langsung di lapangan (*field research*) berupa pengumpulan data-data terkait dengan pengalihfungsian hutan di Kabupaten Sinjai dalam hal ini adalah hutan lindung yang dialihfungsikan ke hutan produksi serta melakukan wawancara kepada Pemerintah yang terkait.
- b. Pengumpulan data sekunder melalui studi literatur (*literature research*), yakni metode untuk mengumpulkan data-data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis data-data sekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Dimana metode ini digunakan untuk menguraikan (1)Pengalihfungsian Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai; dan (2) Upaya dalam mengimplementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung

#### **E. Teknik Penulisan**

Hasil analisis data disajikan secara deskriptif, yakni memaparkan, menguraikan dan menjelaskan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini secara jelas dan terperinci.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

- a. Bab 1: Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.
- b. Bab 2: Tinjauan pustaka, membahas mengenai konsep dan teori, pendapat pakar/ahli dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- c. Bab 3: Metode penelitian, menguraikan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan dan sistematika penulisan.
- d. Bab 4: Pembahasan, berisi analisis permasalahan berdasarkan landasan teori dan data sekunder yang diuraikan secara runtut.
- e. Bab 5: Penutup, memaparkan kesimpulan dan rekomendasi yang diselaraskan dengan kerangka pemikiran sebelumnya.

## BAB IV

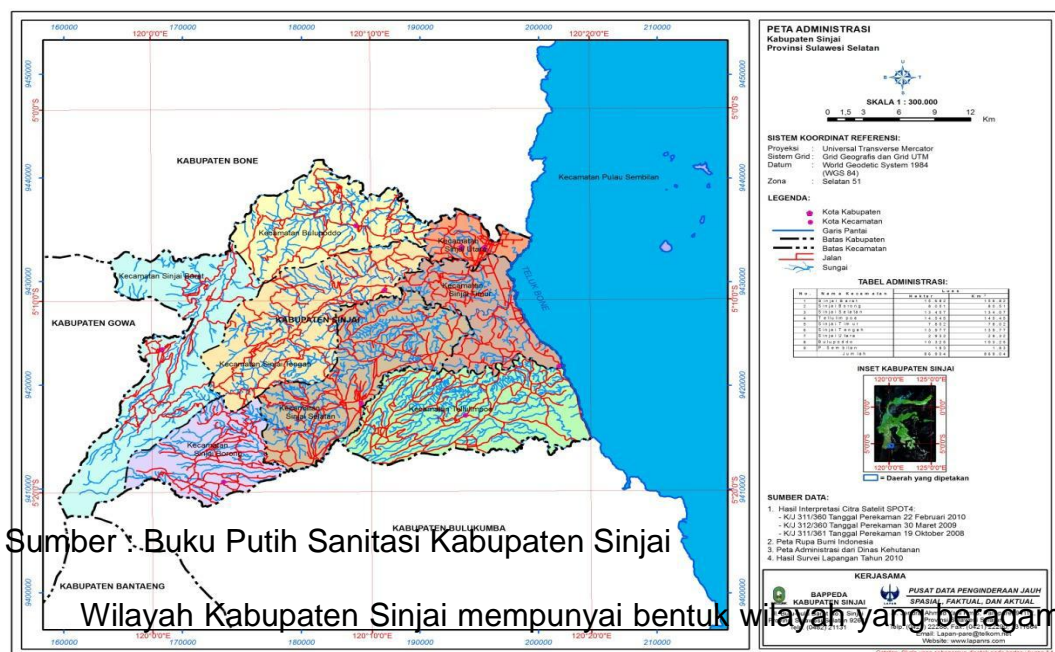
### PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung

Secara geografis, wilayah Kabupaten Sinjai terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan potensi sumberdaya alam yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Secara administrasi Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, dan sebanyak 80 desa/kelurahan. Wilayah Kabupaten Sinjai didominasi oleh bentuk wilayah perbukitan dan pegunungan.

Gambar 1.

Peta Administrasi Kabupaten Sinjai



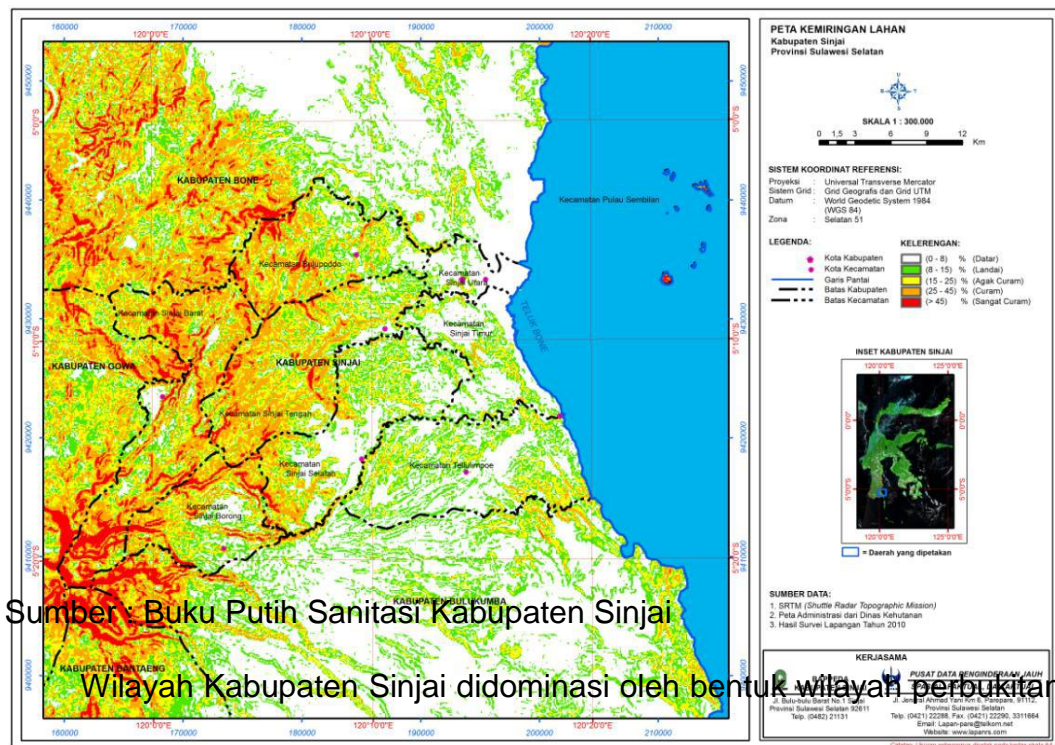
dengan topografi, kemiringan lahan (kontur) dan iklim yang bervariasi.

Adapun topografi dan kemiringan lereng di kabupaten sinjai dimana

memiliki 3 (tiga) dimensi wilayah, yakni wilayah laut/pantai, wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Secara morfologi, kondisi topografi wilayah Kabupaten Sinjai sangat bervariasi, yaitu dari area dataran hingga area yang bergunung. Sekitar 38,26 persen atau seluas 31.370 Ha merupakan kawasan dataran hingga landai dengan kemiringan 0 - 15 persen. Area perbukitan hingga bergunung dengan kemiringan di atas 40 persen, diperkirakan seluas 25.625 Ha atau 31,25 persen.

Gambar 2.

### Peta Lereng Kemiringan Kabupaten Sinjai



Sumber : Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai

Wilayah Kabupaten Sinjai didominasi oleh bentuk wilayah perbukitan dan pegunungan. Meskipun demikian di wilayah ini tidak terdapat gunung berapi. Daerah pegunungan di Kabupaten Sinjai sebagian besar terletak di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai

Borong dan Kecamatan Bulupoddo. Akibat kondisi topografi tersebut maka pengembangan wilayah Kabupaten Sinjai menjadi terbatas<sup>50</sup>.

Adapun berbagai macam potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sinjai yang meliputi potensi pertanian dimana jenis tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Sinjai adalah padi, palawija, buah-buahan dan sayuran, dan jenis tanaman pangan utama yang dikembangkan adalah padi. Selain potensi pertanian, Kabupaten Sinjai juga memiliki potensi perkebunan dan potensi perikanan dan kelautan. Selain itu, adapula potensi sumberdaya alam kehutanan yang terdapat di kabupaten sinjai. Sumberdaya hutan yang terdapat di kabupaten sinjai, meliputi : hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan bakau. Sumberdaya hutan tersebut merupakan potensi sektor kehutanan Kabupaten Sinjai yang memerlukan penanganan dan pengendalian untuk kelangsungan pelestarian<sup>51</sup>.

Saat ini kawasan hutan di Kabupaten Sinjai yang secara formal masih diakui adalah 20.370 ha (22,55 % dari luas wilayah Kabupaten Sinjai. Adapun fungsi kawasan hutan di Kabupaten Sinjai meliputi Hutan Lindung serta Hutan Produksi. Sebaran luasan dan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Sinjai dapat di lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan Kabupaten Sinjai

No	Fungsi Kawasan	Luas (ha)
1.	Hutan Lindung	11. 074

---

<sup>50</sup> Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai, hlm 5

<sup>51</sup> Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai, hlm 22

2.	Hutan Produksi	9. 296
3.	Hutan Konservasi	-
<b>Luas Kawasan Hutan</b>		<b>20.370</b>

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai

Data pada Tabel 1 menunjukkan luas kawasan hutan Kabupaten Sinjai berdasarkan fungsi kawasannya secara keseluruhan baik itu fungsi kawasan hutan Lindung dengan total luas 11.074 ha dan fungsi kawasan hutan produksi seluas 9.296 ha. Namun pada data yang penulis dapatkan dari penelitian yang telah dilakukan hutan konservasi tidak terdapat pada kawasan hutan di Kabupaten Sinjai. Adapun data yang penulis dapatkan luas kawasan hutan yang dirinci berdasarkan per kecamatan dan kelurahan/desa berdasarkan tataguna kesepakatan daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 sebagai berikut.

Tabel 2. Luas Kawasan Hutan dirinci berdasarkan per kecamatan dan kelurahan/desa berdasarkan tataguna kesepakatan daerah Kabupten Sinjai Tahun 2012

<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan/ Desa</b>	<b>Hutan Lindung (ha)</b>	<b>Hutan Produksi (ha)</b>
<b>Sinjai Barat</b>	Turungan Baji	340	763
	Bontosalama	240	2.085
	Arabika	78	200
	Bontolempangan	377	500
	Balakia	225	-
	Gunung Perak	2.583	-

	Barania	1.400	-
<b>Sinjai Borong</b>	Batu Belerang	230	-
	Barambang	377	-
	Bonto Katute	900	-
<b>Sinjai Selatan</b>	Talle	-	200
	Songing	465	-
	Palangka	317	-
	Polewali	587	81
	Puncak	233	-
<b>Sinjai Limpoe</b>	Kalobba	496,375	-
	Saotengah	132,500	-
<b>Sinjai Tengah</b>	Kompang	600	500
	Bonto	345	-
	Saohiring	275	-
	Saotanre	486,125	-
	Baru	-	450
	Pattongko	230	125
	Saotengnga	157	-
<b>Bulupoddo</b>	Duampanuae	-	490
	Tompobulu	-	1.509
	Lamatti Riattang	-	197
			2.196
<b>JUMLAH</b>		<b>11.074</b>	<b>9.296</b>

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai





Sebaran luas hutan produksi terbatas dimana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2023, sebaran luas hutan produksi terbatas di Kabupaten Sinjai terdapat di 4 (empat) wilayah kecamatan, meliputi: Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Tengah, dan Kecamatan Bulupoddo, dengan luas total sebesar 7.193,20 Ha. Hutan Raya (Taman Hutan Raya) Penetapan kawasan Taman Hutan Raya di Kabupaten Sinjai, didasarkan pada SK. Menhut No. 434 Tahun 2009, seluas 860,49 Ha, ditetapkan menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi Taman Hutan Raya Abdul Latief. Lokasi taman hutan raya yang ada di Kabupaten Sinjai berada di Kecamatan Sinjai Borong.

Dalam beberapa dekade terakhir, hutan Indonesia terus mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas. Sejumlah faktor dipandang sebagai penyebab terjadinya situasi tersebut. Kegiatan pembalakan liar, kebakaran hutan, pembangunan pertanian yang tidak terencana, perubahan sistem pemerintahan, konflik sosial di dalam pengelolaan sumberdaya hutan hingga terjadinya konversi hutan atau alih fungsi hutan.

Pengelolaan sumberdaya hutan Indonesia menjadi semakin kompleks yang ditengarai dengan adanya laju konversi kawasan hutan ke peruntukan lain seperti perkebunan, transmigrasi/pemukiman, dan pertanian tanaman pangan. Laju konversi yang tinggi ini sebagai akibat dari perilaku untuk memaksimalkan benefit dari peluang ekspor dan

meningkatnya harga komoditi di pasar internasional. Hingga saat ini laju konversi lahan atau alih fungsi hutan terus dilakukan di kawasan hutan di Indonesia.

Adapun alih fungsi hutan yang terjadi di Kabupaten Sinjai masih terus dilakukan hingga saat ini. Alih fungsi kawasan hutan di Kabupaten Sinjai tersebut dari kawasan hutan lindung di alih fungsikan kepada kawasan hutan produksi. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui penelitian secara langsung ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai dengan mengumpulkan data-data terkait serta melakukan wawancara. Adapun data yang didapatkan oleh penulis terkait dengan Alih Fungsi Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai sebagai berikut.

Tabel 3. Kawasan Hutan yang dialihfungsikan dirinci per kecamatan Kabupaten Sinjai 2011/2013

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas Hutan Lindung yang Dialih Fungsikan (ha)
Sinjai Barat	Arabika	1.155
	Bontosalama	3.428
	Baji	3.983
	Gunung Perak	225
Sinjai Borong	Batu Belerang	950
	Barambang	1.277
Sinjai Selatan	Talle	200
	Polewali	1.122
	Puncak	2.200
Tellulimpoe	Kalloba	496,375

	Salotengah	132,500
Sinjai Tengah	Kompang	1.100
	Baru	936,125
	Patongko	355
	Saotengnga	157
	Saohiring	620
	Gantarang	486,125
Bulupoddo	Duampanuae	490
	Tompobulu	1.509
	Lamati Riattang	197
<b>JUMLAH</b>		<b>21.030,125</b>

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai

Data diatas telah membuktikan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Sinjai telah dialihfungsikan terutama pada kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan peruntukannya. Alihfungsi kawasan hutan di Kabupaten sinjai telah lama dilakukan baik itu pemerintah daerah hingga masyarakat sehingga kawasan hutan di Kabupaten Sinjai telah banyak yang berubah peruntukannya.

Rencana Tata Ruang merupakan alokasi ruang untuk semua kepentingan baik dari pemerintah daerah (termasuk kepentingan instansi sektoral, seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, dll), maupun masyarakat luas yang disusun atas dasar kesepakatan untuk memanfaatkan ruang wilayah secara optimal. Rencana tata ruang mencakup suatu wilayah administratif termasuk kawasan hutan. Rencana

tata ruang disusun melalui suatu proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang berdasarkan input dari para pemangku kepentingan, termasuk dalam sektor kehutanan. Rencana tata ruang memuat indikator utama yaitu suatu acuan penyusunan program pemanfaatan ruang dalam rangka pembangunan nasional, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahannya.

Adapun kawasan hutan di kabupaten sinjai diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 dimana rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya<sup>52</sup>. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) terdiri atas<sup>53</sup> :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam;
- e. Kawasan lindung geologi;
- f. Kawasan lindung lainnya.

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032

<sup>53</sup> Lihat Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032

Adapun kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi <sup>54</sup>:

Pasal 30 ayat (1), Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan.

Pasal 30 ayat (2), Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas : (a) Kawasan hutan lindung, dan (b) Kawasan resapan air.

Pasal 30 ayat (3), kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dengan luas 10.996 (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya permintaan terhadap komoditas pertanian, kayu perkakas, kayu bakar, lapangan pekerjaan, pemukiman, bahan baku industri, dan jasa lingkungan hidup. Pengelolaan SDH bagaimanapun tidak hanya ditujukan bagi terpenuhinya kebutuhan produk kehutanan yang berupa kayu. Masih sangat banyak manfaat lain yang tetap harus dijaga keberlanjutannya. Berbagai upaya yang ditujukan bagi tetap berlangsungnya keberadaan manfaat dan fungsi hutan terus diusahakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Saat ini kawasan hutan di Kabupaten Sinjai diambang kerusakan hal tersebut menyebabkan kawasan hutan semakin menyusut atau

---

<sup>54</sup> Lihat Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032

semakin berkurang. Dari kerusakan dan kemenyusutannya atau semakin berkurangnya kawasan hutan di Kabupaten Sinjai, hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor yang timbul, baik dari masyarakat dimana terjadi pengelolaan lahan kawasan hutan sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain dari masyarakat, kawasan hutan di sinjai semakin menyusut karena diakibatkan oleh pemerintah itu sendiri. Adanya pemerintah di Kabupaten Sinjai untuk mengalih fungsikan hutan dari hutan lindung menjadi hutan produksi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, penulis mendapatkan data bahwa 20 % hutan di kabupaten sinjai saat ini mengalami kerusakan. Dari pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan sendiri mengkategorikan kedalam kawasan hutan atau lahan hutan kritis. Akibat dari menyusutnya hutan di kabupaten sinjai itu tersebut, dinas kehutanan dan perkebunan juga menjelaskan bahwa di dalam kawasan atau lahan hutan di Kabupaten Sinjai khususnya di kawasan hutan lindung telah banyak di temukan warga atau masyarakat yang berdomisili di dalam kawasan hutan lindung. Hal inilah penyebab yang akan memicu masyarakat untuk penebangan pohan atau penebangan liar (*Illegal logging*) dikawan hutan lindung tersebut.

Selain hal tersebut salah satu akibat dari menyusutnya kawasan hutan di Kabupaten Sinjai yaitu terjadinya alih fungsi hutan atau konversi hutan. Dari hasil wawancara penulis terhadap Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, alih fungsi hutan yang terjadi selama ini

dikonversikan menjadi perkebunan dan pemukiman. Adapun data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara yang dilakukan yaitu dimana alih fungsi hutan terjadi di kawasan Kecamatan Sinjai Selatan seluas  $\pm$  196.375 ha dimana terjadi pengalih fungsian dari hutan lindung menjadi perkebunan dan sebagian menjadi pemukiman rakyat. Selain itu, alih fungsi hutan juga terjadi di kawasan Sinjai Borong seluas  $\pm$  132.5 ha dari hutan lindung menjadi perkebunan. Alih fungsi hutan juga terjadi di kecamatan tellu limpoe seluas 200 ha dari hutan produksi terbatas menjadi perkebunan. Jadi total luas hutan yang telah dialih fungsikan dari hasil wawancara penulis terhadap Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai seluas  $\pm$  528.875 ha.

Tentu hal ini sangat diketahui bahwa alih fungsi hutan menjadi ancaman yang sangat besar terhadap bagi keberlangsungan keragaman hayati. Adapun akibat yang ditimbulkan dari pengalih fungsian kawasan hutan di Kabupaten Sinjai intinya akan merusak kelestarian alam. Inti dari dampak yang terjadi di kabupaten sinjai itu sendiri terjadi pada tahun 2006 dimana ketika masyarakat Kabupaten Sinjai diguncang tanah longsor yang mengakibatkan korban jiwa lebih dari 100 orang serta kerugian materil yang tidak sedikit. Daerah yang paling parah adalah wilayah pemukiman yang berada di sekitar wilayah hutan lindung. Karena sebelumnya penulis juga telah menjelaskan bahwa kondisi wilayah atau kondisi topografi di Kabupaten Sinjai berbukit hingga area begunung.

Akibat dari alih fungsi hutan tersebut dampak yang terjadi di Kabupaten Sinjai puncaknya pada tahun 2006 silam. Kasus tanah longsor



pada waktu mengakibatkan adanya korban jiwa. Hal tersebut dikarenakan alih fungsi hutan telah banyak dilakukan di Kabupaten Sinjai. Namun sejak pemerintan Andi Rudianto Asapa yang menjabat sebagai Kepala Bupati Kabupaten Sinjai telah membuat instruksi bupati terkait dengan pelarangan kayu keluar daerah. Hal ini bertujuan untuk tidak adanya lagi penebangan pohon yang dilakukan oleh berbagai pihak. Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kayu Gelondongan Keluar Daerah merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi bencana longsor yang terjadi. Namun, setelah masa kepemimpinan yang baru, kayu gelondongan di Kabupaten Sinjai banyak yang keluar daerah. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kantor DPRD Kabupaten Sinjai dimana salah satu anggota DPRD menyatakan bahwa setelah berakhirnya kepemimpinan Bapak Andi Rudianto Asapa kayu gelondongan kembali keluar daerah Sinjai.

Selain adanya kayu gelondongan yang keluar daerah, di Kabupaten Sinjai juga memproduksi getah pohon pinus. Data yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa hutan pinus tersebut sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung. Hal ini sesuai yang telah diutarakan oleh Andi Sainal selaku anggota DPRD Kabupaten Sinjai Dapil Dua yang menyatakan bahwa hutan pinus atau pohon pinus di Sinjai ini sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung. Namun, hasil wawancara penulis di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai menyatakan bahwa hutan lindung yang ditanami pohon pinus tersebut masih bisa dikatakan hutan lindung yang diproduksi. Namun penulis

menganggap bahwa hutan lindung Hutan lindung dikelompokkan ke dalam kawasan lindung berupa kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya bersama kawasan bergambut dan kawasan resapan lainnya<sup>55</sup>.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah<sup>56</sup>. Namun penulis menganggap bahwa pohon pinus itu bersifat kapitalis, sebab tidak ada lagi yang dapat tumbuh di bawah anguknya pohon pinus.

Produksi Pohon pinus di Kabupaten Sinjai sendiri telah dilakukan oleh pemerintah dan data yang diperoleh penulis bahwa produksi pohon pinus tersebut pemerintah telah melakukan kerjasama dengan PT. Rakindo. Luas kawasan hutan pinus di Kabupaten Sinjai adalah 3.155 ha. Untuk memanfaatkan potensi getah pinus, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah menerapkan sistem kompensasi atas pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus melalui perjanjian Kerjasama Sadapan Getah Pinus No.800/138/Disbunhut/2007 antara Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai dengan PT. Rakindo Utama Makmur.

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan pinus lestari melalui pendekatan Pengelolaan Hutan Bersama

---

<sup>55</sup> Eko Nurwijayanto, 2008. *Analisis Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung Dalam Rangka Penataan Ruang Di Kabupaten Deli Serdang*. Sekolah Pascasarjana IPB : Bogor. Hlm 24

<sup>56</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Masyarakat (PHBM). Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa di sekitar hutan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memberikan keuntungan kepada investor (dunia usaha). Dengan demikian, akan terjadi sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Hal ini juga di ungkapakan oleh kepala bagian sub kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai.

Luas hutan tanaman pinus yang siap sadap di Kabupaten Sinjai adalah 3.155 ha dengan jumlah pohon 1.009.200 pohon . Potensi produksi getah setiap pohon dapat mencapai 30 gr/pohon/hari, namun berdasarkan pengalaman petani penyadap dari Pulau Jawa Produksi getah rata-rata sebesar 20 gr/pohon/hari. Dengan jumlah pohon pinus siap sadap sebanyak 1.009.200 pohon<sup>57</sup>.

Tabel 4. Potensi Hutan Pinus di Kabupaten Sinjai

No	Lokasi	Desa	Kecamatan	Luas (ha)	Umur (thn)	Jumlah Pohon
1	Pussokko	Balakia	Sinjai Barat	220	34	66.000
2	Pussokko	Balakia	Sinjai Barat	15	32	4.500
3	Pussokko	Balakia	Sinjai Barat	200	30	60.000
4	Bungin	B.Lempangan	Sinjai Barat	100	29	30.000
5	Rumpala	B.Lempangan	Sinjai Barat	50	28	15.000
6	Rumpala	B.Lempangan	Sinjai Barat	50	21	15.000
7	Bungin	B.Lempangan	Sinjai Barat	100	26	30.000
8	Rumpala	B.Lempangan	Sinjai Barat	50	25	15.000
9	Rumpala	B.Lempangan	Sinjai Barat	786	22	314.000
10	Gorrana	B.Lempangan	Sinjai Barat	215	21	86.000
11	Kp. Baru	Kompang	Sinjai Tengah	100	21	40.000
12	Laiyya	Kompang	Sinjai Tengah	84	21	35.200

<sup>57</sup> Alimuddin Rianse, 2010. *Pengembangan Sistem Kompensasi Areal Hutan Yang Dialihfungsikan*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Hlm 41

13	Tangkalae	T. Baji	Sinjai Barat	224	17	73.000
14	Bontona	B. Salama	Sinjai Barat	277	16	83.000
15	Buluparingi	Kompang	Sinjai Tengah	164	15	32.000
16	Buluparingi	Tompubolu	Bulopoddo	300	14	60.000
17	Jenna	Polewali	Sinjai Selatan	200	19	5.900
<b>Jumlah</b>				<b>3.155</b>	<b>-</b>	<b>1.009.200</b>

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjan 2010

Data diatas menunjukkan hutan pinus yang akan siap sadap pada tahun 2010. Hal inilah yang membuktikan bahwa hutan pinus di kabupaten sinjai yang sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung. Pohon pinus merupakan pohon yang bersifat kapitalis artinya tidak ada yang tumbuh pohon lain dar hutan pinus tersebut. Jadi, penulis menganggap bahwa salah satu penyebab yang terjadi akibat bencana longsor dan banjir itu diakibatkan karena banyaknya pohon pinus di kawasan hutan Sinjai.

Penulis juga telah mendapatkan data bahwa kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan berada di kawasan perbukitan dan pegunungan kabupaten sinjai. Selain itu, penulis juga telah menjelaskan sebelumnya kondisi wilayah topografi di Sinjai. Wilayah tofografi di Sinjai sangat bervariasi, yaitu dari area daratan hingga daerah yang bergunung. Sekitar 38,26 persen atau seluas 31.270 ha merupakan kawasan daratan hingga landai dengan kemiringan 0 - 45 persen. Area perbukitan hingga bergunung dengan kemiringan di atas 40 persen, diperkrakan seluas 25.625 ha atau 31,25 persen.

Kondisi topografi Kabupaten Sinjai tersebut yang bervariasi dan data yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara yang dilakukan dimana rata-rata hutan yang ada di kabupaten sinjai berada di daerah perbukitan dan pegunungan. Data yang penulis dapatkan dari hasil

wawancara di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai yaitu pohon pinus atau hutan pinus rata-tara berada di kawasan perbukitan dan pegunungan. Hal inilah penulis menganggap bahwa salah satu yang menjadi akibat dari adanya peristiwa longsor beberapa tahun silam karena pemerintah dan instansi terkait menanam pohon pinus di kawasan pegunungan atau perbukitan. Kawasan pegunungan tersebut otomatis berada pada kemiringan di atas 40 persen.

Jika dianalisis fungsi kawasan hutan di kabupaten sinjai maka kawasan hutan pinus atau produksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan kawasan kehutanan. Seharusnya kawasan tersebut yang berada di kemiringan di atas 40 persen harusnya ada kawasan hutan lindung. Namun di kabupaten sinjai itu sendiri kawasan hutan di atas kemiringan 40 persen malah dijadikan menjadi hutan produksi menjadi hutan pinus.

Analisis kawasan hutan lindung dapat dilihat dari kriteria-kriteria dalam penentuan kawasan hutan lindung dimana kawasan hutan tersebut memiliki ketinggian lebih dari 2000 meter serta memiliki kemiringan lebih dari 40 %. Teknik yang dilakukan adalah dengan melakukan *overlay* peta kawasan hutan dengan peta ketinggian dan kemiringan lereng<sup>58</sup>.

Keterangan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup bahwa dengan kemiringan lebih dari 45 persen tidak boleh ditanami dengan pohon yang berjenis endemik. Misalnya rotan, pinus, dll. Namun kenyataannya di kabupaten sinjai tu

---

<sup>58</sup> Ibid, hlm 34

sendiri malah mengubah fungsi hutan lindung di kemiringan lebih dari 40 persen.

Berikut ini merupakan kriteria kawasan hutan lindung menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 :

- a. Kawasan hutan dengan lereng, jenis tanah, intensitas hujan harian rata-rata dengan skor melebihi 175;
- b. Kawasan hutan dengan lereng melebihi 40 %;
- c. Jalur pengaman sungai, minimal 100 m kanan kiri sungai besar dan 50 m kanan kiri anak sungai diluar pemukiman;
- d. Pelindung mata air, minimal 200 meter disekeliling mata air;
- e. Pelindung sempadan pantai, minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- f. Pelindung danau/waduk, 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- g. Kawasan rawan bencana, yaitu yang berpotensi mengalami longsor, letusan gunung berapi dan gempa bumi;
- h. Kawasan hutan dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut;
- i. Kawasan gambut di hulu sungai dengan tebal 3 meter atau lebih;
- j. Kawasan resapan air, yaitu daerah dengan curah hujan tinggi mempunyai geomorfologi dan struktur tanah yang mudah meresapkan air secara besar-besaran;

- k. Kawasan hutan bakau, minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat;
- l. Kawasan suaka alam, taman nasional dan cagar budaya.

Alih fungsi hutan lindung memang diperbolehkan dalam Undang-Undang. Namun dalam melakukan alih fungsi hutan harus memperhatikan beberapa kriteria-kriteria terhadap kawasan hutan. Desentralisasi kehutanan sebagai kebijakan prioritas Dephut mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Jika dalam periode sebelumnya (1999-2003) penguatan desentralisasi menjadi salah satu kebijakan prioritas, maka untuk periode 2004-2009, desentralisasi pengurusan kehutanan menjadi salah satu kebijakan pendukung dari lima kebijakan prioritas kehutanan tahun 2004-2009, yang antara lain mencakup penanganan pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal, revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dan pemantapan kawasan hutan<sup>59</sup>.

Berikut ini merupakan beberapa kewenangan daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai terkait dengan pengalihfungsian hutan lindung di Kabupaten Sinjai. *Pertama*, Kewenangan Bupati Sinjai dalam alih fungsi hutan lindung yaitu memberikan beberapa instruksi terkait dengan

---

<sup>59</sup> Subarudi, 2007. *Otonomi Daerah Bidang Kehutanan: Implementasi dan Tantangan Kebijakan Perimbangan Keuangan*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR). Hlm 7

perubahan fungsi kawasan hutan. Instruksi tersebut ditujukan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis instruksi yang disebutkan oleh Sub Bagian Hukum Kantor Bupati Sinjai hanya lebih dominan menjelaskan instruksi terkait dengan pengawasan dan pengelolaan hutan serta penggunaan gergaji rantai dan atau sejenisnya. Instruksi tersebut lebih menekankan pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola serta pemanfaatan hutan yang di Sinjai demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, staf Sub Bagian Hukum Kantor Bupati juga menjelaskan bahwa pertimbangan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam melakukan alih fungsi hutan yaitu untuk meningkatkan pendapatan anggaran daerah serta fungsi pengendalian hutan. Dari instruksi tersebut yang ditujukan kepada Dinas terkait sudah sesuai dengan prosedur dalam perubahan fungsi kawasan hutan seperti apa yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dalam alih fungsi hutan.

Hal inilah yang dinyatakan oleh staf Sub Bagian Hukum Kantor Bupati dengan instruksi tersebut sudah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/KPTS-II/2000 tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan dan sudah sesuai dengan pengkajiannya yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1615/KPTS-VII/2001 tentang Alih Fungsi Kawasan Hutan Hanya Untuk Optimalisasi Fungsi Kawasan Hutan dan sudah sesuai dengan kriteria-kriteria dalam alih fungsi hutan lindung. Namun penulis menganggap bahwa ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan



pengalih fungsian hutan di Sinjai. Dilain pihak, penulis juga memperoleh data di DPRD Kabupaten Sinjai dengan melakukan wawancara kepada anggota DPRD yang menjelaskan bahwa alih fungsi hutan di Kabupaten Sinjai rata-rata berada di daerah yang berbukit hingga berada diatas kelerengan 40 persen. Hal inilah penulis menganggap bahwa alih fungsi hutan lindung di Kabuapten Sinjai tidak sesuai dengan kriteria-kriteria dalam pengalihfungsian kawasan hutan.

Jika diperhatikan kriteria-kriteria alih fungsi hutan baik itu kelerengan, jenis tanah hingga pada curah hujan maka perlu dilakukan pengkajian oleh beberapa ahli. Selain adanya instruksi Bupati Sinjai, salah satu kewenangan Bupati juga pada perjanjiannya untuk bekerjasama dengan PT. Rakindo dalam mengelola produksi fungsi hutan di Sinjai. Kerjasama tersebut berkaitan dengan pengelolaan hutan pinus.

*Kedua*, Kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai meliputi pelaksanaan pengalihfungsian hutan tersebut yang telah dinstruksikan oleh Bupati Sinjai. Dari kewenangan tersebut penulis menganggap bahwa sebagai dinas yang terkait seharusnya mampu mengkaji kawasan hutan yang akan dialihfungsikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara penulis terhadap dinas terkait, menjelaskan bahwa pohon-pohon pinus tersebut di daerah pegunungan dengan lereng kemiringan 40 persen keatas karena pemerintah mempunyai target untuk melakukan sadap getah pinus dalam 1000 ton / tahun, namun hasilnya 800 ton saja. Hal inilah salah satu acuan dalam melakukan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Sinjai.

Adapun wewenang Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai dalam melakukan kerjasama dengan PT. Rakindo melalui perjanjian Kerjasama Sadapan Getah Pinus No.800/138/Disbunhutl2007 antara Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai dengan PT. Rakindo Utama Makmur. Dari hasil wawancara penulis, Kepala Bagina Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai juga menjelaskan dampak buruk dalam alih fungsi hutan lindung tersebut, dimana bisa saja akan berpengaruh terhadap kelestarian hutan dan bisa saja apabila disadap terus maka pohon itu akan mati. Penulis juga menganggap bahwa pemerintah terkait tidak memperhatikan resapan air dan curah hujan. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hutan pinus itu bersifat kapitalis, sebab tidak adalagi yang dapat tumbuh di bawah angkuhnya pohon pinus. Maka dari itu resapan air dalam hutan pinus tersebut semakin berkurang, jadi hal inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya peristiwa banjir dan bencana longsor.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai**

Alih fungsi kawasan hutan akan terjadi sebagai akibat dari dua penyebab yaitu <sup>60</sup>:

1. Adanya persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di pemangku kepentingan sebagai contoh konversi lahan hutan ke pembagunan infrastruktur, pertanian, perkebunan, pemukiman, pembangunan perkotaan dan industri.

---

<sup>60</sup> Deden Djaenuddin. *Beberapa Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Kawasan Hutan Ke Non Hutan*. Hlm 133

2. Kegagalan sistem ekonomi sehingga tidak mampu memperoleh nilai lingkungan yang sebenarnya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari banyaknya fungsi dari sumberdaya hutan yang tidak ada pasarnya, kebijakan fiskal seperti subsidi *input* dan kebijakan *non-fiskal* seperti kemudahan dalam prosedur untuk mendapatkan ijin membuka kawasan hutan meningkatkan keputusan untuk mengkonversi lahan hutan.

Dari beberapa akibat tersebut hal inilah yang dapat menimbulkan pengalihfungsian hutan di Indonesia. Selain itu, adapula beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya alih fungsi hutan di Indonesia yang meliputi karena kondisi pasar, tekanan penduduk, sarana dan prasarana serta adanya kebijakan dari pemerintah<sup>61</sup>.

#### 1. Kondisi Pasar

Adanya konversi hutan karena dengan membandingkan nilai *net benefit* yang akan diperoleh dari perubahan tersebut terhadap *benefit* dari pemanfaatan hutan. Perdagangan di pasar domestik maupun pasar internasional untuk komoditi kehutanan dan/atau perkebunan dan pertanian mendorong terjadinya alih fungsi kawasan hutan. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan laju *deforestasi* yang disebabkan oleh perdagangan kayu. Selain itu juga didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap produk pertanian dan lahan pemukiman. Keputusan konversi tersebut akan dipengaruhi oleh harga-harga *input* dan *output* dan seluruh biaya yang harus dikeluarkan dalam konversi tersebut.

---

<sup>61</sup> Ibid, hlm 136

Perkembangan dari harga-harga input dan *output* merupakan signal dari arah pasar. Produsen akan cenderung untuk meningkatkan volume produksinya jika harga *output* di pasar menunjukkan kecenderungan meningkat, dan sebaliknya akan menurunkan produksinya jika terjadi peningkatan harga *input*.

## 2. Tekanan Penduduk

Pertambahan penduduk yang secara alami terus meningkat merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya alih fungsi kawasan hutan. Kebutuhan terhadap lahan baik untuk pertanian maupun pemukiman meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk. Perubahan kepadatan penduduk, khususnya di daerah pedesaan, akan meningkatkan permintaan lahan untuk kebutuhan pertanian. Kondisi ini diperparah dengan tidak jelasnya sistem kepemilikan lahan sehingga mendorong penduduk untuk membuka kawasan hutan.

## 3. Sarana dan Prasarana

Investasi untuk infrastruktur di wilayah pedesaan seperti pembangunan jalan mempunyai baik dampak positif maupun negatif. Pembangunan jalan akan mengubah struktur ekonomi dan sosial dan akan berdampak pada kondisi ekosistem.

## 4. Kebijakan Pemerintah

Instrumen kebijakan ekonomi yang mengatur pengelolaan sumberdaya hutan secara teori berpeluang menghasilkan kegagalan pasar dan kebijakan yang mendorong terjadinya *deforestasi*. Kebijakan mempunyai peran yang besar dalam penambahan luas lahan pertanian

dan perkebunan dimana kebijakan tersebut baik fiskal maupun moneter berdampak pada laju *deforestasi*. Sebagai contoh, intervensi harga, pajak, dan subsidi cenderung serta kebijakan di sektor hilir (industri yang terintegrasi dengan perkebunan) mendorong perluasan daerah perkebunan dan pertanian. Kondisi ini akan meningkatkan kegiatan untuk memaksimalkan manfaat dalam jangka pendek *rent seeker* dengan membuka kawasan sekitar perbatasan hutan dan pertanian.

Adanya faktor-faktor tersebut menyebabkan kawasan hutan mengalami perubahan fungsi kawasan. Hal ini dikarenakan telah di alihfungsikan dari berbagai pihak. Dari data yang di peroleh oleh penulis, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengalihfungsian hutan lindung di Kabupaten Sinjai tersebut diantaranya : *Pertama*, Kondisi Pasar seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa karena tekanan kondisi pasar serta meningkatnya permintaan produk pertanian dan perkebunan serta pemukiman hal ini menjadi alasan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam melakukan alih fungsi hutan. Ketika hutan lindung tersebut dialihfungsikan menjadi kawasan produksi maka akan mendapatkan retribusi. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Dinas Kehutanan dan Perkebunan bahwa tujuan dari alih fungsi hutan khususnya di kawasan hutan pinus akan mendapatkan retribusi daerah bukan hanya hasil dari penyadapan getahnya tetapi buah dan biasanya kayu yang sudah tua juga di produksi. Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjelaskan bahwa salah satu pendapatan anggaran daerah dari potensi hutan di Kabupaten Sinjai. Selain potensi produksi pinus tersebut dimana

pemerintah sendiri mempunyai target untuk mencapai retribusi daerah potensi hutan mangrove juga mempunyai pendapatan daerah yang signifikan.

Akan tetapi pendapat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan berbeda dengan pihak dari DPRD Kabupaten Sinjai. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis beberapa anggota DPRD menjelaskan bahwa pendapatan anggaran daerah dari potensi produksi kehutanan memang ada namun tidak terlalu signifikan. Namun, selama periode tahun 2006 - 2010, perekonomian Kabupaten Sinjai mengalami pertumbuhan positif. Berdasarkan perhitungan harga yang berlaku, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sinjai mencapai nilai sebesar pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.086.674,18,-, kontribusi terbesar sekitar 56,03% adalah sektor pertanian dan Kehutanan. Untuk lebih jelasnya perkembangan PDRB Kabupaten Sinjai berdasarkan lapangan usaha, tahun 2006 – 2010, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Perkembangan PDRB Kabupaten Sinjai Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan (Dalam Juta) Tahun 2006-2010

NO	SEKTOR EKONOMI	PDRB KABUPATEN SINJAI				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian & Perkebunan	504.062	524.243	551.819	585.392	608.887
2	Pertambangan	4.226	4.497	5.436	5.319	5.665
3	Industri Pengolahan	16.240	17.011	18.527	19.300	20.330
4	Listrik, Gas & Air	2.406	2.514	2.646	2.710	2.910
5	Bangunan	35.907	38.063	42.403	46.220	50.428

6	Hotel & Restoran	79.862	86.960	100.633	100.633	117.371
7	Angkutan & Komunikasi	27.847	29.443	32.682	36.315	40.829
8	Persewaan & Perubahan	39.548	44.703	51.655	60.538	67.488
9	Jasa-Jasa	135.245	143.848	151.907	164.514	172.761
<b>JUMLAH</b>		<b>845.346</b>	<b>891.286</b>	<b>957.712</b>	<b>1.024.934</b>	<b>1.086.674</b>

Sumber : Kab. Sinjai Dalam Angka Tahun 2011

Struktur perekonomian Kabupaten Sinjai pada periode tahun 2006 - 2010 relatif meningkat. Berdasarkan rata-rata data terlihat bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB di provinsi tersebut adalah sektor sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (52%).

*Kedua*, dengan adanya alih fungsi hutan lindung maka akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Data jumlah penduduk Kabupaten Sinjai 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2006 sebanyak 222.220 jiwa, sedangkan pada tahun 2010 mencapai 228.936 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan adanya pertambahan jumlah penduduk sekitar 6.716 jiwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,8% pertahun. Indeks pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Sinjai pada setiap kecamatan selama waktu tahun 2006 hingga tahun 2010, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 6. Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2006-2011

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (Jiwa/Tahun)
1	2006-2007	222.220	-
2	2007-2008	223.522	0,59

3	2008-2009	225.943	1,08
4	2009-2010	228.304	1,04
5	2010-2011	228.936	0,28
Rata-rata pertumbuhan penduduk			0,75

Sumber : Kab. Sinjai Dalam Angka Tahun 2011

Tabel diatas menunjukan perkembangan penduduk di Kabupaten Sinjai setiap tahunnya. Dari perkembangan tiap tahunnya rata-rata pertumbuhan penduduk 0,75 jiwa/tahun. Dari pertumbuhan tersebut maka otomatis lapangan pekerjaanpun harus ditambah. Oleh karenanya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu alih fungsi hutan juga akan menciptakan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat. Dengan kawasan hutan pinus tersebut yang diproduksi oleh pemerintah dan bekerjasama dengan PT. Rakindo dapat menciptakan lapangan pekerjaan misalnya saja dalam penyiapan getah pinus maka masyarakat yang melakukan pekerjaan tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Terhadap Alih Fungsi Hutan diantaranya: *Pertama* kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yang memberikan beberapa instruksi terkait dengan perubahan fungsi kawasan hutan, namun dari beberapa kewenangan tersebut dalam alih fungsi hutan tidak sesuai dengan peruntukan fungsi dan kriteria-kriteria dalam pengalihfungsian hutan sesuai dengan Peraturan Menteri kehutan Nomor P.34 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kondisi hutan di Sinjai. Pemerintah daerah juga menyetujui adanya kerjasama dengan PT. Rakindo terkait dengan pengelolaan produksi fungsi hutan. *Kedua*, kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai yaitu melaksanakan pengalihfungsian hutan yang telah di instruksikan Bupati Sinjai serta menjalankan kerjasama dengan PT. Rakindo yang telah disetujui oleh Bupati Sinjai.
2. Alih fungsi kawasan hutan terjadi karena beberapa faktor diantaranya kondisi pasar, tekanan penduduk, sarana dan prasarana serta karena kebijakan pemerintah itu sendiri. Alih fungsi

hutan lindung di Kabupaten Sinjai juga dilakukan oleh pemerintah setempat karena beberapa faktor diantaranya adanya retribusi yang meningkat serta menciptakan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat.

## **B. Saran**

1. Perlu membuat kebijakan atau peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan lindung termasuk didalamnya kawasan hutan serta kawasan nonhutan berkaitan dengan pemantapan kawasan yang *clear and clean*, baik secara hukum dan sosial kemasyarakatan, serta kejelasan kewenangan pemanfaatan dan pengelolaan oleh *stakeholders* di daerah.
2. Pemerintah Daerah harus memperhatikan dampak buruk yang akan terjadi dalam melaksanakan konversi lahan kawasan hutan khususnya dalam alih fungsi hutan lindung dan Pemerintah Daerah terkait harus memperhatikan kondisi wilayah sebelum melakukan alih fungsi kawasan hutan serta diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap dokumen perencanaan pemanfaatan ruang (RTRW) Kabupaten Sinjai yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agung Nugraha, 2004. *Menyongsong Perubahan Menuju Evitalisasi Sektor Kehutanan*. Jakarta : Wirma Aksara
- Alimuddin Rianse, 2010. *Pengembangan Sistem Kompensasi Areal Hutan Yang Dialihfungsikan (Produk : Model Pengembangan)*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
- Dermawan, A. 2004. Otonomi dan keuangan daerah: Implikasi-implikasinya untuk sektor kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. CIFOR. Bogor
- Eko Nurmijayanto, 2008. *Analisis Kawasan Hutan Dan Kawasan Lindung Dalam Rangka Arahana Penataan Ruang Di Kabupaten Deli Serdang*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
- HAW. Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Maklin, A.R. 2000. *Desentralisasi Urusan Kehutanan dan Pembangunan Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah. Prosiding Seri Lokakarya IV. Desentralisasi Urusan Kehutanan dan Program Kehutanan Nasional*. Jakarta : LIPI Pers
- Rahmi Hidayanti, 2006. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Pelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Tangerang : Wana Aksara
- Sarundajang. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Kedaerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Subarudi, 2007. *Otonomi Daerah Bidang Kehutanan: Implementasi dan Tantangan Kebijakan Perimbangan Keuangan*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR)
- Suparmoko. 1997. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*. Yogyakarta. BPFE
- Supriadi, 2011. *Hukum Kehutan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Syamsuddin Aris, 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : LIPI Pers

Zain, AS. 1996. Hukum lingkungan Konservasi Hutan. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta

### **Artikel dan Karya Ilmiah**

Agenda 21 Indonesia, 1996. *Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup: Jakarta

Eko Nurwijayanto, 2008. *Analisis Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung Dalam Rangka Penataan Ruang Di Kabupaten Deli Serdan*. Sekolah Pascasarjana IPB : Bogor

Ida Ayu Pradnya Resosudarmo, *Tinjauan Kebijakan Sektor Perakayuan dan Kebijakan Terkait Lainnya*, dalam Ida Ayu Pradnya Resosudarmo, *Ke mana Melangkah*

Riyanto, B. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam*. Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.

Supartman, 1997. *Kajian Nilai Hutan; Studi Kasus Fungsi Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi Pada Areal Hutan Gowa- Maros*. Tesis

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032

### **Website**

Anggi Stapal, 2010. *Pengalih Fungsian Hutan Lindung Di Kabupaten Sinjai*. melalui [suarakomunitas.net/baca/9114/pengalihan-fungsi-hutan-lindung-di-kabupaten-sinjai/](http://suarakomunitas.net/baca/9114/pengalihan-fungsi-hutan-lindung-di-kabupaten-sinjai/) [20 Agustus 2013].

Koes Saparadji, 2002. *Alih Fungsi Kawasan Hutan Hanya Untuk Optimalisasi Fungsi Kawasan Hutan*. Diakses melalui [www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1587](http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1587) [09 September 2013]